

**PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN DAN KOMITE  
AUDIT TERHADAP KETEPATAN WAKTU PELAPORAN  
KEUANGAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI**

**ZAKKY PATRIA YUDHA  
8155087997**



**Skripsi ini Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Pendidikan**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI  
KONSENTRASI PENDIDIKAN AKUNTANSI  
JURUSAN EKONOMI DAN ADMINISTRASI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
2016**

**THE INFLUENCE OF BOARD OF INDEPENDENT  
COMMISSIONER AND AUDIT COMMITTEE TO  
TIMELINESS OF FINANCIAL REPORTING IN  
MANUFACTURING COMPANY IN BEI**

**ZAKKY PATRIA YUDHA  
8155087997**



*Skripsi is Written as Part Of Bachelor Degree in Education Accomplishment*

**ECONOMIC EDUCATION STUDY PROGRAM  
CONCENTRATION OF ACCOUNTING EDUCATION  
DEPARTMENT OF ECONOMICS AND ADMINISTRATION  
FACULTY OF ECONOMICS  
JAKARTA STATE UNIVERSITY  
2016**

## ABSTRAK

**Zakky Patria Yudha.** *Pengaruh Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur di BEI.* Skripsi, Jakarta: Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi, dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2016.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data yang tepat (Sahih, benar, valid) dan dapat dipercaya (dapat diandalkan, reliable) atau fakta mengenai masalah yang akan diteliti, yaitu membuktikan pengaruh komisaris independen dan komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur di BEI.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014. Banyaknya sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 92 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan untuk memecahkan masalah tersebut yaitu analisis logistik biner.

Hasil penelitian diperoleh bahwa *pertama*, Komisaris Independen tidak berpengaruh langsung yang signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur di BEI pada tahun 2014. Komisaris Independen yang diproksi dengan proporsi komisaris independen dari jumlah seluruh anggota komisaris terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,699 lebih besar daripada taraf signifikansi 5%, atau 0,050. *kedua*, Komite Audit berpengaruh langsung yang signifikan terhadap Komite Audit yang diproksi dengan proporsi anggota komite audit yang memiliki keahlian di bidang finansial dari seluruh jumlah anggota komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,012 dimana lebih kecil dari taraf signifikansi 5% atau 0,050. *ketiga*, Komisaris Independen dan Komite Audit berpengaruh secara serentak terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur di BEI dilihat berdasarkan nilai *omnibus test of model coefficients* sebesar  $0,022 < 0,050$ ,  $\alpha = 5\%$ .

## ABSTRACT

**Zaky Patria Yudha. *The Influence of Board of Independent Commissioner and Audit Committee to Timeliness of Financial Reporting In Manufacturing Company in BEI.*** Skripsi, Jakarta: Concentration in Accounting Education, Department of Economics, Department of Economics and Administration, Faculty of Economics, State University of Jakarta, in 2016.

*This study aims to get the right data and trustworthy or the fact of the matter to be investigated, that prove the influence of Board independent commissioner and audit committee to the timeliness of financial reporting on manufacturing companies in BEI.*

*The population in this study are all manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange in 2014. The number of samples used in this study was 92 companies. The data analysis technique used to solve the problem is the analysis of binary logistic.*

*The result showed that the first, the Board Independent Commissioner no significant direct impact on the timeliness of financial reporting on manufacturing companies on the Stock Exchange in 2014. Board Independent Commissioner proxied by the proportion of independent commissioners of the total number of commissioners to the timeliness of financial reporting has a significance value of 0.699 is greater than the significance level of 5%, or 0,050. second, the Audit Committee has direct influence significantly to the Audit Committee are proxied by the proportion of audit committee members who have expertise in the financial sector of the total members of the audit committee of the timeliness of financial reporting has a significance value of 0.012 which is smaller than the significance level of 5% or 0,050 , Third, Boaed Independent Commissioner and Audit Committee simultaneously affect the timeliness of financial reporting on manufacturing companies in BEI visits based on the value of the omnibus test of the model coefficients of  $0.022 < 0.050$ ,  $\alpha = 5\%$ .*

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Penanggung Jawab  
Dekan Fakultas Ekonomi

Dr. Dedi Purwana E.S., M.Bus  
NIP. 196712071992031001

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. <u>Drs. Nurdin Hidayat MM., M.Si</u> NIP. 19661030 200012 1 001	Ketua		2 Februari 2016
2. <u>Erika Takidah, SE., M.Si</u> NIP. 19751111 200912 2 001	Sekretaris		5 Februari 2016
3. <u>Ati Sumiati, S.Pd, M.Si</u> NIP. 19790610 200801 2 028	Penguji Ahli		5 Februari 2016
4. <u>Santi Susanti, S.Pd, M.Ak</u> NIP. 19770113 200501 2 002	Pembimbing I		10 Februari 2016
5. <u>Susi Indriani, M.S.Ak</u> NIP. 19760820 200912 2 001	Pembimbing II		8 Februari 2016

Tanggal Lulus: 28 Januari 2016

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Negeri Jakarta maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Skripsi ini belum dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta.

Jakarta, 16 Februari 2016

Yang membuat pernyataan



Zakky Patria Yudha

No. Reg 8155087997

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Pengaruh Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI”*.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Ekonomi & Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Dalam menyusun laporan ini, penulis banyak memperoleh bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Dedi Purwana, E.S., M.Bus., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta;
2. Drs. Nurdin Hidayat M.M., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ekonomi & Administrasi;
3. Dr. Siti Nurjanah, SE, M.Si., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi;
4. Santi Susanti, S.Pd., M.Ak., selaku Ketua Konsentrasi Pendidikan Akuntansi serta Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dengan kesabaran penuh;
5. Susi Indriani, M.S.Ak., selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dengan segenap hati agar skripsi ini selesai dengan baik;

6. Orang tua penulis yang selalu mensupport;
7. Teman seperjuangan skripsi Syaihu, Fauzan, Finda, Laras, Nichi, Putri, Agam, dan Herry

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Jakarta, 16 Februari 2016

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A.Latar Belakang Masalah .....	1
B.Identifikasi Masalah .....	11
C.Pembatasan Masalah .....	12
D.Perumusan Masalah .....	13
E.Kegunaan Penelitian .....	13
<b>BAB II KAJIAN TEORITIK</b>	
A.Deskripsi Konseptual .....	14
1. Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan.....	14
2. Komisaris Independen .....	21
3. Komite Audit.....	27
B.Hasil Penelitian yang Relevan .....	32
C.Kerangka Teoritik .....	36
D.Perumusan Hipotesis .....	40
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A.Tujuan Penelitian .....	41
B. Waktu Penelitian .....	41
C.Metode Penelitian .....	41
D.Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel .....	42
E. Jenis dan Sumber Data.....	43
F. Instrumen Penelitian.....	44
G.Teknik Analisis Data .....	45

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A.Deskripsi data .....	48
1.Ketepatan Waktu .....	49
2.Komisaris Independen.....	50
3.Komite Audit .....	52
B.Analisis Data .....	54
1. Uji Multikolinearitas .....	54
2. Uji Kesesuaian Model ( <i>Hosmer and Lemeshow Test</i> ) .	56
3. Menilai keseluruhan model ( <i>overall model fit</i> ).....	56
4. Hasil Pengujian Hipotesis .....	58
C. Interpretasi Hasil Penelitian .....	60

## **BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN**

A.Kesimpulan .....	65
B.Implikasi .....	66
C.Saran .....	68

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>73</b>
-----------------------	-----------

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Data Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan .....	76
Lampiran 2 : Data Komisaris Independen .....	78
Lampiran 3 : Data Komite Audit .....	80
Lampiran 4 : Data <i>Outlier</i> .....	82
Lampiran 5 : Perhitungan nilai batas atas dan batas bawah Komisaris Independen dan Komite Audit .....	83
Lampiran 6 : Hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS versi 16.....	84
Lampiran 7 : Riwayat Hidup .....	102

## DAFTAR TABEL

III.1 Hasil Seleksi Sampel Kriteria .....	43
IV.1 Statistik Deskriptif .....	49
IV.2 Distribusi Frekuensi Komisaris Independen.....	51
IV.3 Distribusi Frekuensi Komite Audit.....	53
IV.4 Hasil Uji Multikolinieritas .....	55
IV.5 <i>Correlation Matrix</i> .....	55
IV.6 Hasil Uji Kesesuaian Model ( <i>Hosmer and Lemeshow Test</i> ) .....	56
IV.7 Hasil Uji <i>Overall Model Fit</i> .....	57
IV.8 Hasil Uji Simultan ( <i>Omnibus Tests of Model Coefficients</i> ).....	57
IV.9 Hasil Uji <i>Cox &amp; Snell R Square dan Nagelkerke R Square</i> .....	58
IV.10 Hasil Uji Hipotesis ( <i>Variables in the Equation</i> ) .....	59

## DAFTAR GAMBAR

Gambar III.1	Konstelasi Hubungan Antar Variabel .....	42
Gambar IV.1	Diagram <i>Pie</i> Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan .....	49
Gambar IV.2	Grafik Histogram Komisaris Independen .....	51
Gambar IV.2	Grafik Histogram Komite Audit .....	53

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di zaman yang terus berkembang seperti saat ini informasi menjadi kebutuhan yang sangat penting seiring dengan kemajuan di berbagai bidang. Informasi sangat penting bagi setiap penggunanya untuk pengambilan keputusan.

Laporan keuangan merupakan salah satu informasi yang berperan penting dalam bisnis investasi di pasar modal. Para kreditor dan investor dapat menilai kredibilitas suatu perusahaan dari laporan keuangan yang dibuat oleh emiten, sehingga mereka bisa melihat sejauh mana kinerja emiten tersebut serta membuat berbagai keputusan kredit dan investasi yang menyangkut masa depan mereka.

Informasi yang bermanfaat tentunya adalah informasi yang berkualitas. Informasi yang berkualitas memiliki banyak kriteria. Informasi yang tidak berkualitas dan cenderung menyesatkan justru akan sangat merugikan pengguna informasi. Laporan keuangan juga harus memberikan informasi yang berkualitas bagi penggunanya. Laporan keuangan yang disampaikan harus memiliki relevansi dan dapat dipercaya. Informasi yang relevan mempunyai tiga unsur nilai yaitu nilai prediksi, nilai umpan balik, dan tepat waktu.

Dalam penyampaian laporan keuangan kepada publik ketepatan waktu pelaporan keuangan perlu diperhatikan. Ketepatan waktu pada informasi berkaitan erat dengan relevansi yang menentukan kualitas dari informasi tersebut. Ketepatan

waktu pelaporan keuangan (*Timeliness*) merupakan karakteristik penting bagi laporan keuangan. Informasi yang disajikan tidak tepat waktu akan mengurangi atau bahkan menghilangkan kemampuannya sebagai alat bantu prediksi bagi pemakainya. Ketersediaan informasi merupakan bentuk transparansi dari emiten kepada publik. Emiten wajib menyampaikan informasi pada waktu yang tepat kepada publik.

Informasi yang disampaikan tepat waktu merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap investor. Investor menginginkan laporan keuangan yang lengkap dan tepat waktu. emiten diharapkan untuk tidak menunda penyajian laporan keuangannya. Laporan keuangan yang dilaporkan secara tepat waktu dapat mengurangi asimetri informasi. Asimetri informasi merupakan suatu keadaan dimana satu pihak (*Principal*) yang terlibat dalam kesepakatan keuangan tidak memiliki informasi yang akurat dibanding pihak lain (*Agent*). Investor membutuhkan informasi secara adil, karena jika tidak adil akan menyebabkan terjadinya *insider trading* atau *insider information* dan juga kecurangan-kecurangan lainnya di pasar modal.

Dalam pasar modal di setiap negara mempunyai badan khusus yang mengatur dan mengawasi segala kegiatan di pasar modal. Aturan tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan secara berkala diatur dalam keputusan ketua BAPEPAM No. Kep-346/BL/2011 peraturan nomor X.K.2 tentang penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan public No.2.c. yang menyatakan laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada

BAPEPAM dan LK dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

Emiten yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan akan dikenakan sanksi administrasi dan denda sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Masih banyak emiten yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan tahunan mereka.

dalam berita yang dimuat *Neraca.co.id* dibalik melesatnya laju indeks harga saham gabungan (IHSG) di pasar modal hingga menembus rekor baru 5.523, rupanya masih menyisakan masalah soal tingkat kedisiplinan emiten dalam menyampaikan laporan keuangan yang telat dan tidak sesuai dari ketentuan pihak Bursa Efek Indonesia (BEI).

Dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis (9/4), Bursa Efek Indonesia melaporkan ada 52 emiten yang belum menyampaikan laporan keuangan audit per Desember 2014, dari total perusahaan tercatat (saham dan obligasi) sebanyak 547 emiten.<sup>1</sup>

Emiten yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya diberikan sanksi dari mulai sanksi administratif, kemudian ditambah dengan denda hingga ratusan juta dan bahkan bisa terkena suspensi. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam bisnis di pasar modal ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan merupakan suatu hal yang penting berkaitan dengan aspek transparansi perusahaan.

---

<sup>1</sup> Tim Redaksi Neraca. co.id, *Payah 52 Emiten Terlambat Laporkan Laporan Keuangan, 2015* (<http://www.neraca.co.id/article/52481/payah-52-emiten-telat-laporkan-keuangan>) diakses pada 18 Juni 2015



Menurut Yanuar Rizki seorang analis pasar modal dari Aspirasi Indonesia Research Institute, keterlambatan penyampaian laporan keuangan akan merugikan investor karena laporan itu sangat berpengaruh terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Yanuar menambahkan, bila terlambatnya sesekali mungkin tidak masalah, tetapi bila terlalu sering terjadi maka patut dicermati dan dipertanyakan. Para investor tampaknya memandang biasa soal keterlambatan laporan keuangan itu. Padahal ini adalah kesempatan bagi para bandar untuk menggoreng saham. Tetapi bagi para investor selama mereka bisa meraih untung tentu tidak masalah.<sup>2</sup>

*Corporate Governance* (tata kelola perusahaan) merupakan serangkaian mekanisme untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan. *Good corporate governance* (tata kelola perusahaan yang baik) saat ini menjadi hal yang sangat penting dalam tata kelola perusahaan. Peran dari *Good Corporate Governance* (GCG) sangat dibutuhkan di pasar modal. *Good Corporate Governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menghubungkan antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan *stakeholders*. Penyampaian informasi laporan keuangan kepada publik sesuai dengan prinsip-prinsip utama dari GCG yaitu *Fairness, Transparency, Accountability, Responsibility*. Bagi *stakeholders*, kepentingan mendasar selain mendapat keuntungan adalah mendapat perlakuan dan perlindungan yang seimbang dari perusahaan. Kepentingan ini dipenuhi melalui implementasi prinsip pertama dari GCG yaitu

---

<sup>2</sup> Fajri Gelu, *Laporan Keuangan Telat, Harusnya Diperiksa*, 2012 (<http://pasardana.com/tag/laporan-keuangan/>) diakses tanggal 2 Mei 2014

*Fairness* yang diantaranya adalah hak untuk memperoleh informasi material mengenai perusahaan secara tepat waktu. Prinsip *Transparancy* juga mendukung agar pemberian informasi material harus segera dilaporkan kepada publik. Investor tentu ingin segera mengetahui keadaan suatu perusahaan untuk segera mengambil berbagai keputusan sehingga mereka bisa mempertimbangkan keuntungan dan kerugian yang akan mereka hadapi.

Pasar modal saat ini menuntut emiten untuk mengimplementasikan GCG. BAPEPAM atau OJK juga telah menerbitkan serangkaian peraturan yang memiliki korelasi yang kuat dengan pengimplementasian GCG, sayangnya berbagai pelanggaran yang bertentangan dengan GCG di Indonesia masih sering terjadi. Pengimplementasian GCG akan meningkatkan kinerja perusahaan. Penerapan praktek-praktek GCG dalam perusahaan dapat menyebabkan laporan keuangan yang lebih baik serta pengungkapan dan pelaporan bisnis yang lebih transparan.

Komisaris independen merupakan salah satu instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan GCG yang memiliki fungsi untuk memonitoring kinerja direksi atau manajemen. Pembuatan laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen tentunya juga dipantau oleh komisaris independen. sehingga dengan adanya komisaris independen berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Dalam berita yang dimuat oleh *kontan.co.id*, setelah sempat bermaslah dengan laporan keuangan PT. Saraswati Griya Lestari Tbk (HOTL) telah

menyatakan komitmen untuk memberikan dan menyajikan laporan keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Surat itu disampaikan HOTL pada 11 Juni 2014 dan ditandatangani oleh Frans Faizal Hasjim selaku Direktur Utama HOTL dan Elizabeth Linandi sebagai Komisaris Independen kepada otoritas bursa efek indonesia (BEI).“kami berkomitmen untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu dan andal,”demikian bunyi surat tersebut, jum’at (13/6). HOTL diketahui telat menyampaikan laporan keuangan baik tahun 2013 maupun interim kuartal I 2014.<sup>3</sup>

Sesuai dengan ketentuan bursa, perusahaan harus memiliki jumlah komisaris independen minimal 30 % dari jumlah anggota komisaris. Seperti yang dikutip dalam *kontan.co.id* “BEI mewajibkan emiten memiliki komisaris independen minimal 30 % dari anggota dewan komisaris.”<sup>4</sup>

Selain komisaris independen, komite audit juga memiliki peran dalam memonitor serta mengawasi audit laporan keuangan. Menurut Arya Baskoro, dalam konteks perusahaan, komite audit adalah sebuah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris. Dalam hal ini komite audit membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggung jawab pengawasannya, yang meliputi penelaahan atas

---

<sup>3</sup> Amalia Putri Hasniawaty, *Manajemen HOTL janji tak mengulangi kesalahan*,2014 (<http://investasi.kontan.co.id/news/manajemen-hotl-janji-tak-mengulangi-kesalahan>) diakses tanggal 23 Desember 2014

<sup>4</sup> Amalia Putri Hasniawaty, *BEI Batasi Jabatan Direksi dan Komisaris*,2014 (<http://investasi.kontan.co.id/news/bei-batasi-jabatan-direksi-dan-komisaris>) diakses pada 28 Desember 2014

laporan tahunan auditan, laporan keuangan, penelaahan terhadap proses pelaporan keuangan dan sistem pengendalian internal, serta pengawasan atas proses audit.<sup>5</sup>

*Kontan.co.id* melaporkan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) lama-lama gerah juga melihat semakin maraknya kasus kejahatan kerah putih yang melibatkan emiten pasar modal.

Nurhaida, Ketua Bapepam-LK, mengungkapkan, otoritas pasar modal tengah mempertimbangkan untuk mengubah aturan Bapepam Nomor IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Tujuan revisi meningkatkan kualitas pengawasan terhadap emiten pasar modal.

Dalam beleid tersebut, otoritas mewajibkan setiap emiten memiliki Komite Audit. Itu adalah komite yang dibawah oleh dewan komisaris sebuah emiten. Komite itu bertugas memberikan pendapat ke dewan komisaris terhadap laporan atau segala hal yang disampaikan direksi kepada dewan komisaris.

Komite ini juga berperan mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperhatikan oleh dewan komisaris. Sebagai contoh, terkait laporan keuangan dan ketaatan terhadap aturan perundang-undangan.

Komite audit juga melaporkan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi kepada dewan komisaris. Intinya, komite ini bertugas memastikan ketepatan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate*

---

<sup>5</sup> Arya Baskoro, *Keberadaan Komite Audit di Indonesia-Serta Peran dan Kontribusi Mereka dalam Penerapan Enterprise Risk Manajemen (ERM) di Perusahaan*, 2014 (<http://www.crmsindonesia.org/node/660>) diakses pada 11 November 2014

*governance*). Bapepam-LK menilai, keberadaan komite ini perlu diperkuat seiring dengan semakin kompleksnya dunia bisnis dan usaha saat ini.<sup>6</sup>

Kantor Akuntan Publik (KAP) juga bisa berpengaruh dalam ketepatan waktu pelaporan keuangan. KAP diminta untuk tidak terlambat dalam mengaudit laporan keuangan. seperti yang diberitakan *Akuntan Online*, sebanyak 52 emiten terlambat menyerahkan laporan keuangan (LK) tahun 2012. Keterlambatan tersebut sebagai dampak dari keterlambatan akuntan publik (AP) melakukan audit.

“Keterlambatan tersebut bisa berawal dari proses penunjukkan AP-nya. Sehingga akhirnya terlambat pula memulai auditnya,” kata Kepala Eksekutif Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Nurhaida di Jakarta, Jum’at (3/05/2013).

Meski adanya emiten terlambat menyampaikan LK, kata Nuraida, OJK belum berencana untuk mengenakan sanksi kepada AP yang terlambat melakukan Audit. OJK melihat laporan keuangan audited itu merupakan tanggung jawab emiten, walau keterlambatan itu bisa disebabkan AP mengaudit. “Memang ada kemungkinan keterlambatan itu disebabkan AP, tapi intinya harus sesuai dengan waktu dan setiap keterlambatan dikenakan denda Rp 1 juta per hari,” tambahnya.<sup>7</sup>

Beberapa emiten menyampaikan alasan mereka tidak dapat melaporkan laporan keuangan tepat waktu. Alasan ini menjadi faktor penyebab mereka tidak

---

<sup>6</sup> Amailia Putri Hasniawati, *Marak kasus, komite audit akan diperkuat*, 2011. (<http://investasi.kontan.co.id/news/marak-kasus-komite-audit-akan-diperkuat-1>) diakses pada 23 Desember 2014

<sup>7</sup> Redaksi Akuntanonline, *Ada Andil AP, Emiten Telat Sampakan LK*, 2013, p.1 (<http://akuntanonline.com/showdetail.php?mod=art&id=454&t=Ada%20Andil%20AP,%20Emiten%20Telat%20Sampakan%20LK&kat=Auditing>) diakses tanggal 20 November 2014

mampu menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu kepada publik. Emiten memang diwajibkan untuk menyampaikan alasan keterlambatan laporan keuangannya. Bagi emiten yang terlambat dan tidak menyampaikan alasan keterlambatannya akan dikenakan sanksi seperti yang diberitakan *Indonesia Finance Today*, Bursa Efek Indonesia akan mengenakan sanksi penghentian sementara perdagangan saham (*suspend*) jika tidak menyampaikan alasan keterlambatan laporan keuangan.

Hoesen, Direktur Penilaian Perusahaan BEI, mengungkapkan surat peringatan kepada emiten yang terlambat akan dikeluarkan oleh bursa. “Sebelumnya kita akan kasih peringatan dulu minta penjelasan terkait keterlambatan. Kalau dua kali tidak mengindahkan surat peringatan, bursa akan men-*suspend* emiten tersebut,” ujar Hoesen.<sup>8</sup>

Beberapa alasan tersebut diantaranya adalah minimnya jumlah personil akuntansi dan konsolidasi, seperti yang diberitakan oleh *Panin Sekuritas*, PT Rimo Catur Lestari Tbk (RIMO) mengungkapkan hingga saat ini perseroan masih memiliki kendala terkait dengan masalah keterlambatan penyampaian laporan keuangan perseroan. Menurut manajemen RIMO dalam keterbukaan informasi, Selasa, masih minimnya jumlah personil yang membidangi keuangan dan akuntansi, serta keterbatasan kualitas personil yang menjadi penyebabnya. Selain itu, kualitas infrastruktur seperti perangkat keras dan perangkat lunak serta penyampaian waktu informasi dan data keuangan dari lokasi toko ke kantor pusat

---

<sup>8</sup> Abdul Wahid Fauzie, *BEI Suspend Emiten yang Tak Jelaskan Keterlambatan Laporan Keuangan*, 2014, p.1 (<http://www.ift.co.id/posts/bei-suspend-emiten-yang-tak-jelaskan-keterlambatan-laporan-keuangan>) diakses tanggal 20 November 2014

juga perlu diperbaiki. “Kendala-kendala ini yang akan kami perbaiki agar dapat menyampaikan laporan keuangan tepat pada waktunya,” tutur manajemen perseroan.<sup>9</sup>

Contoh lain yang disebabkan oleh masalah konsolidasi seperti yang dialami oleh BORN. *Kontan.co.id* melaporkan emiten batubara milik Samin Tan, PT Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk (BORN), tak kunjung menyerahkan laporan keuangan tahun 2013 maupun interim kuartal I dan II 2014.

Atas keterlambatan ini, Bursa Efek Indonesia pun mensuspensi perdagangan saham sejak 30 Juni 2014 lalu. Alexander Ramlie, Presiden Direktur BORN menjelaskan, keterlambatan tersebut disebabkan oleh “peristiwa diluar kendali perusahaan”.

Peristiwa yang dimaksud adalah BORN menunggu penyelesaian laporan keuangan tahun 2013 Asia Resources Mineral Plc (ARMS) dan PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU).

BORN, saat ini, tercatat menguasai kepemilikan tidak langsung atas 23,8% saham ARMS. “Setelah Perseroan menerima laporan keuangan tahun 2013 dari ARMS dan Berau maka dilakukan perhitungan atas kerugian ekuitas (*equity accounting losses*),” tulis Alexander dalam keterangan resmi, Jum’at (5/7)<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Redaksi Panin Sekuritas, *Ini alasan RIMO telat sampaikan laporan keuangan, 2013*, p.1 (<http://www.pans.co.id/?page=berita&id=SU5GLTIwMTMwMTA4MTIwMDIxLnhtbA==>) diakses tanggal 20 November 2014

<sup>10</sup> Veri Nurhansyah Tragistina, *Ini alasan BORN telat rilis laporan keuangan 2013, 2014*, p.1 (<http://investasi.kontan.co.id/news/ini-alasan-born-telat-rilis-laporan-keuangan-2013>) diakses tanggal 1 Desember 2014

Seperti yang sudah diuraikan mengenai pentingnya laporan keuangan disampaikan secara tepat waktu, cukup banyak faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Untuk mewujudkan *Good Corporate Governance*, suatu tata kelola perusahaan yang baik yang dapat menjaga atau merangkul seluruh kepentingan dari elemen yang ada dalam pasar modal maka prinsip-prinsip dari GCG perlu diterapkan. Komisaris independen dan komite audit merupakan instrumen dari mekanisme GCG yang memiliki peran penting dalam mengontrol kinerja perusahaan termasuk pelaporan keuangan. Penelitian ini akan meneliti pengaruh keberadaan komisaris independen dan komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas peneliti mengidentifikasi masalah bahwa yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah:

1. Keberadaan komisaris independen yang proporsi jumlahnya dengan dewan komisaris tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh regulator
2. Keberadaan komite audit dengan jumlah yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh regulator
3. Kantor Akuntan Publik yang terlambat melakukan audit
4. Minimnya jumlah personil akuntansi
5. Konsolidasi perusahaan yang tidak berjalan dengan baik



### **C. Pembatasan Masalah**

Penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas pada pengaruh komisaris independen dan komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Komisaris independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat, atau dengan cara lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan. Komisaris independen diukur dengan proporsi jumlah komisaris independen dengan menggunakan indikator persentase dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dari seluruh jumlah anggota dewan komisaris perusahaan

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bertugas melaksanakan pengawasan atas proses pelaporan keuangan. Komite audit diukur dengan jumlah satuan orang yang menduduki jabatan komite audit dan memiliki kompetensi di bidang finansial dalam perusahaan.

Ketepatan waktu pelaporan keuangan adalah kualitas ketersediaan informasi pada saat yang diperlukan atau kualitas informasi yang baik dilihat dari segi waktu. Ketepatan waktu pelaporan keuangan diukur dengan dummy variabel dimana perusahaan dikategorikan terlambat jika laporan keuangan dilaporkan setelah tanggal 31 Maret. Sedangkan perusahaan yang tepat waktu adalah perusahaan yang menyampaikan laporan keuangan sebelum atau tepat pada tanggal 31 Maret. Dimana Kategori 0 (nol) untuk perusahaan yang tidak tepat waktu dan kategori 1 (satu) untuk perusahaan yang tepat waktu.

#### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut : “ Apakah terdapat pengaruh Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan.”

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi peneliti : Untuk menambah wawasan dan mengaplikasikan pengetahuan, memberikan wacana bagi perkembangan studi yang sejenis.
2. Bagi lembaga-lembaga yang terkait pasar modal : dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh komisaris independen dan komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Penelitian juga diharapkan mendorong pihak perusahaan untuk memberikan informasi yang tepat waktu dan berupaya mewujudkan *good corporate governance*.
3. Bagi investor : Penyampaian informasi laporan keuangan yang tepat waktu merupakan bagian penting dari daya guna informasi laporan keuangan.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORETIK**

#### **A. Deskripsi Konseptual**

##### **1. Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan**

Ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan salah satu bagian dari relevansi yang merupakan salah satu kualitas dari informasi laporan keuangan. Belkaoui mengatakan bahwa, “agar relevan, informasi harus tersedia untuk para pengambil keputusan sebelum ia kehilangan kapasitasnya untuk memengaruhi pengambilan keputusan (ketepatan waktu).”<sup>11</sup> Menurut Suwardjono mengenai ketepatan waktu (*timeliness*) sebagai kualitas informasi yaitu,

Kualitas ini berkaitan dengan ketersediaan informasi pada saat dibutuhkan. Informasi yang sebenarnya bernilai prediksi dan balikan tinggi dapat menjadi tidak relevan kalau tidak tersedia pada saat dibutuhkan. Ketepatan waktu informasi mengandung pengertian bahwa informasi tersedia sebelum kehilangan kemampuannya untuk mempengaruhi atau membuat perbedaan dalam membuat keputusan.<sup>12</sup>

Pengguna informasi laporan keuangan seperti pemegang saham membutuhkan informasi yang disajikan secara tepat waktu. Oleh karena itu manajemen harus menyampaikan informasi kepada pemegang saham tepat pada waktunya sebagai bentuk pertanggung jawaban (*stewardship*).

---

<sup>11</sup> Ahmed Riahi-Belakoui, *Accounting Theory: edisi 5* (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm. 238

<sup>12</sup> Suwardjono, *Akuntansi Pengantar: Edisi Ketiga* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta), hlm. 11

Dalam bisnis pasar modal pada kaitannya dengan pentingnya ketepatan waktu pelaporan keuangan dijelaskan dalam konsep *good corporate governance* (GCG). GCG sendiri merupakan sebuah konsep yang merupakan pengembangan dari teori keagenan (*Agency Theory*), yaitu sebuah teori yang menjelaskan hubungan antara agen (manajemen perusahaan) dan prinsipal (pemilik perusahaan/ pemegang saham). Dalam hubungan keagenan terdapat suatu kontrak yang mana satu orang atau lebih ( prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal dan memberikan wewenang kepada agen untuk memberikan keputusan yang terbaik bagi prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976).<sup>13</sup>

Sementara itu, Daniri dalam bukunya mengatakan bahwa *agency theory* yang dikembangkan oleh Michael Johnson memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai “*agents*” bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri.<sup>14</sup>

Berbagai pemikiran mengenai *corporate governance* berkembang dan bertumpu pada *agency theory* dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Gine Das Prena, “Pengaruh Keberadaan Komisaris Independen pada Kecepatan Penyerahan Laporan Keuangan Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek di Indonesia”, *Jurnal Riset Akuntansi (JUARA)*, Vol. 2, No.1, Feb 2012, hlm.22-30

<sup>14</sup> Mas Achmad Daniri, *LEAD BY GCG* (Jakarta : Gagas Bisnis, 2014), hlm. 5

<sup>15</sup> Tim Studi Pengkajian Penerapan Prinsip-Prinsip OECD 2004 dalam Peraturan Bapepam mengenai Corporate Governance, *Studi Penerapan Prinsip-Prinsip OECD 2004 dalam Peraturan Bapepam mengenai Corporate Governance* ( Depertemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, 2006), hlm. 10-11

Menurut Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, “GCG secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk stakeholder.<sup>16</sup>

Dalam GCG dijelaskan bahwa informasi yang tersedia tepat pada waktunya merupakan bentuk perlindungan terhadap para pemegang saham. Ridwan Khairandy dan Camelia Malik mengatakan bahwa,

Konsep GCG di Indonesia dapat diartikan sebagai konsep pengelolaan perusahaan yang baik. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini. Pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya. Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan *stakeholder*.<sup>17</sup>

GCG memiliki prinsip-prinsip utama yang diantaranya menjelaskan bahwa tentang kewajiban perusahaan menyampaikan informasi pada waktu yang tepat. Indra surya dan Ivan Yustiavandana mengungkapkan prinsip utama dari GCG berdasarkan yang telah dirumuskan oleh *Organization for Economic Coperation and Development* (OECD), adalah :

- a. *Fairness* (Kewajaran)
- b. *Disclosure/Transparency* (Keterbukaan/Transparansi)
- c. *Accountability* (Akuntabilitas)
- d. *Responsibility* (Responsibilitas).<sup>18</sup>

### **Prinsip *Fairness* ( Kewajaran )**

Dalam prinsip *fairness* pada kaitannya dengan penyampaian informasi yang tepat waktu beberapa ahli megatakan,

---

<sup>16</sup> Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *Good Corporate Governance: Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum* (Jogjakarta: Total Media, 2007), hlm.2

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Indra Surya dan ivan Yustiavandana, *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha* (Jakarta: Kencana,2008), hlm.68

### 1. Indra Surya dan Ivan Yustiavandana

Prinsip *fairness* menyatakan keharusan bagi sebuah perusahaan untuk memberikan kedudukan yang sama dalam perusahaan terhadap para pemegang saham, sehingga kerugian akibat perlakuan diskriminatif dapat dicegah sedini mungkin. Secara konkret, implementasi dari prinsip tersebut bagi kepentingan para pemegang saham dapat diwujudkan dengan memberikan hak-hak sebagai berikut:

- 1) Hak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam suatu RUPS
- 2) Hak untuk memperoleh informasi material mengenai perseroan secara tepat waktu dan teratur
- 3) Hak untuk menerima sebagian keuntungan dari perseroan.<sup>19</sup>

### 2. I Putu Gede Ary Suta

“Salah satu syarat untuk terciptanya pasar modal yang fair dan efisien apabila semua investor bisa mendapatkan informasi dalam waktu dan kualitas yang sama.”<sup>20</sup>

## **Prinsip *Transparency* (Keterbukaan/Transparansi)**

Dalam prinsip *Transparency* pada kaitannya dengan penyampaian informasi yang tepat waktu beberapa ahli mengatakan,

### 1. Ridwan Khairandy dan Camelia Malik,

Prinsip ini (transparansi) mengakui bahwa pemegang saham mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang benar, akurat, dan tepat pada waktunya mengenai perusahaan, mengenai kinerja suatu perusahaan, hasil keuangan dan operasionalnya, dan informasi mengenai tujuan perusahaan.<sup>21</sup>

### 2. Irsan Nasarudin dan Indra Surya

Transparansi dalam pasar modal berarti keharusan emiten, perusahaan publik, dan pihak lain yang tunduk kepada UUPM untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat

---

<sup>19</sup> M. Irsan Nasarudin dan Indrasurya, *op.cit.*, hlm.71

<sup>20</sup> I Putu Gede Ary Suta, *Menuju Pasar Modal Modern* (Jakarta: Yayasan SAD Satria Bhakti, 2000), hlm.98

<sup>21</sup> Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *op.cit.*, hlm.79

berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek yang dimaksud atau harga dari efek tersebut.<sup>22</sup>

### 3. Azhar Maksu

“Prinsip transparansi mengiginkan agar pemegang saham memperoleh informasi yang cukup benar, akurat, dan tepat waktu sehingga pemegang saham tidak tersesat dalam pengambilan keputusan.”<sup>23</sup>

### 4. OJK ( Otoritas Jasa Keuangan )

“keterbukaan informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai hal-hal terkait perusahaan yang bersifat material merupakan prasyarat utama bagi kerangka tata kelola perusahaan.”<sup>24</sup>

## **Prinsip *Accountability* (Akuntabilitas)**

Dalam prinsip *Accountability* pada kaitannya dengan penyampaian informasi yang tepat waktu beberapa ahli megatakan,

### 1. Ridwan Khairandy dan Camelia Malik

“Prinsip akuntabilitas diwujudkan antara lain dengan menyiapkan laporan keuangan (Financial Statement) dengan akurat, tepat pada waktunya, dan dengan cara yang tepat pula.”<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> M. Irsan Nasarudin dan Indrasurya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia* (Jakarta: Kencana,2004),hlm.225

<sup>23</sup> Azhar Maksu, “Tinjauan atas Good Corporate Governance di Indonesia”, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Akuntansi Manajemen pada Fakultas Ekonomi, diucapkan dihadapan Rapat Terbuka Universitas Sumatera Utara, Gelanggang Mahasiswa, Kampus USU, 17 Desember 2005, hlm. 31

<sup>24</sup> Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia: Menuju Tata Kelola Emiten dan Perusahaan Publik yang Lebih Baik* (Jakarta: OJK,2014),hlm.37

<sup>25</sup> Ridwan Khairandy dan Camelia Malik,*op.cit.*,hlm 83

## 2. Azhar Maksun

“Khusus untuk bidang akuntansi, penyiapan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku serta diterbitkan tepat waktu juga jelas merupakan wujud dari prinsip akuntabilitas ini.”<sup>26</sup>

Pada kaitannya dengan penyampaian informasi yang tepat waktu sebagai perlindungan terhadap kepentingan publik, diatur dalam keputusan BAPEPAM Nomor: KEP-346/BL/2011 tentang penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik peraturan nomor X.K.2 no.2.c yang menyebutkan bahwa laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada BAPEPAM dan LK dan diumumkan kepada masyarakat pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan.<sup>27</sup>

Dyer dan McHugh yang merupakan pelopor dari penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pada tahun 1975 mengungkapkan,

*Many accountants, managers, financial analysts believe that timeliness is an important characteristic of financial statements* (banyak akuntan, manajer dan analis keuangan percaya bahwa ketepatan waktu adalah karakteristik penting dari laporan keuangan).<sup>28</sup>

Kenley dan Staubus (1972) dalam Dyer dan McHugh (1975) mengatakan bahwa *“That the value of financial statement varies inversely with the time taken*

---

<sup>26</sup> Azhar Maksun, *op.cit.*, hlm. 13

<sup>27</sup> Lampiran Peraturan BAPEPAM Nomor : KEP-346/BL/2011 No.X.K.2 ([www.bapepam.go.id/pasar\\_modal/publikasi\\_pm/siaran\\_pers\\_pm/2011/pdf/Press\\_release\\_X.K.2.pdf](http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/publikasi_pm/siaran_pers_pm/2011/pdf/Press_release_X.K.2.pdf)) diakses pada tanggal 11 November 2014

<sup>28</sup> Dyer and McHugh, “*The Timeliness of Australian Annual Report*”, *Journal of Accounting Research*, Autumn 1975, p.204



*to prepare it.* (nilai dari laporan keuangan berbanding terbalik dengan waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkannya).<sup>29</sup>

Untuk melihat ketepatan waktu, biasanya suatu penelitian melihat keterlambatan pelaporan (lag). Dyer dan McHugh menggunakan tiga kriteria keterlambatan dalam penelitiannya, Dyer dan McHugh mengungkapkan,

*Throughout the remainder of this study, three primary lag will be referred to. They are here defined as:*

- 1) *Preliminary lag : The open interval of the number of days from the year-end to the receipt of the preliminary final statement by the Sidney Stock Exchange.*
- 2) *Auditor's signature lag : The open interval of number of days from the year-end to the date recorded as the opinion signature date in the auditor's report.*
- 3) *Total Lag : The open interval of the number of days from the year-end to the receipt of the published annual report by the Sidney stock exchange.*

(Pada penelitian ini, terdapat tiga keterlambatan utama. Keterlambatan tersebut didefinisikan sebagai:

- 1) *Preliminary lag* : interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai penerimaan akhir *preliminary* oleh bursa.
- 2) *Auditor's signature lag* : interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal laporan auditor ditandatangani.
- 3) *Total lag* : interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal penerimaan laporan dipublikasikan oleh bursa.<sup>30</sup>

Chambers dan pennman mendefinisikan ketepatan waktu dalam dua cara.

Dalam penelitiannya Chambers dan Penman mengungkapkan,

*Timeliness is defined in two ways. In the first phase of the paper, we defined it as the reporting lag from the fiscal period covered by the report to the date of the report. In our second analysis, we define timeliness of earnings reports relative to their expected days* (ketepatan waktu di definisi ke dalam dua cara. Dalam fase pertama pada penelitian ini, ketepatan waktu didefinisikan sebagai keterlambatan waktu pelaporan dari tanggal laporan keuangan sampai tanggal melaporkan. Pada analisis kedua, ketepatan waktu

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, p.205

<sup>30</sup> *Ibid.*, p.206

ditentukan dengan ketepatan waktu pelaporan relatif atas tanggal pelaporan yang diharapkan).<sup>31</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Respati (2004) yang berjudul Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan: Studi Empiris Di Bursa Efek Jakarta , ketepatan waktu pelaporan keuangan diukur berdasarkan keterlambatan pelaporan keuangan perusahaan. Ketepatan waktu diukur dengan dummy variabel, dimana kategori 1 untuk perusahaan yang tepat waktu dan ketgori 0 untuk perusahaan yang tidak tepat waktu.<sup>32</sup>

Penelitian Rachmad Saleh (2004) yang berjudul Studi Empiris Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta juga mengukur ketepatan waktu pelaporan keuangan dengan dummy variabel, dimana kategori 1 untuk perusahaan yang tepat waktu dan ketgori 0 untuk perusahaan yang tidak tepat waktu.<sup>33</sup>

## 2. Komisararis Independen

Saat ini pemerintah Indonesia mengharuskan penerapan *good corporate governance* pada perusahaan-perusahaan terutama perusahaan yang telah *go public* yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam rangka perbaikan dan peningkatan ekonomi.

Untuk melindungi kepentingan pemegang saham independen maka harus ada sistem yang baik yaitu *good corporate Governance* yang mewajibkan

---

<sup>31</sup> Chambers and pennman, "The Timeliness of Reporting and The Stock Price reaction to earnings announcements", *Journal of Accounting research* , vol.22,No. 1, Spring 1984, pp.21-22.

<sup>32</sup> Novita Weningtyas Respati, "Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan: Studi Empiris Di Bursa Efek Jakarta", *Jurnal Maksi vol. 4*, Januari 2004, hlm. 67-81

<sup>33</sup> Rachmad Saleh, "Studi Empiris Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta", *Simposium Nasional Akuntansi VII*, Desember 2004, hlm. 897-910

keberadaan komisaris independen. Menurut Irna Juliana Sitorus, “adanya komisaris independen di suatu perusahaan adalah merupakan suatu persyaratan yang mutlak harus dipenuhi oleh perusahaan tercatat di bursa efek untuk menciptakan tata kelola yang baik di dalam perusahaan”.<sup>34</sup> Adanya komisaris independen tidak terlepas dari keberadaan komisaris pada umumnya. Komisaris merupakan organ yang mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada direksi.

Indra Surya dan Ivan Yustiavandana mengungkapkan pengertian komisaris independen adalah

Komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat, atau dengan cara lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan.<sup>35</sup>

Robert L. Tricker dalam bukunya Antonius Alijoyo dan Subarti Zaini menguraikan bahwa di Amerika Serikat dan beberapa negara lain,

*Outside director* (semacam komisaris independen) berfungsi untuk memberikan penilaian yang objektif dan independen yang dapat menjadi pertimbangan *board* dalam pengambilan keputusan. *Outside director* memiliki kontribusi yang sangat penting yaitu sebagai bagian dari mekanisme *checks and balance* untuk memastikan bahwa *executive directors* tidak memanfaatkan perusahaan untuk kepentingan pribadi.<sup>36</sup>

Antonius Alijoyo dan Subarto Zaini mengatakan bahwa komisaris independen adalah,

Anggota komisaris yang berasal dari luar perusahaan (tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan) yang dipilih secara transparan dan independen, memiliki integritas dan kompetensi yang memadai, bebas dari

---

<sup>34</sup> Irna Juliana Sitorus, “Analisis Peran Komite Audit yang Efektif dan Independensi Dewan Komisaris (Studi pada Badan Usaha Milik Negara yang Tercatat pada Bursa Efek Indonesia)”, *Seminar Nasional Akuntansi dan Bisnis*, Bandung, 27 Maret 2012, hlm.665

<sup>35</sup> Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, *op.cit.*, hlm.135

<sup>36</sup> Antonius Alijoyo dan Subarto Zaini, *Komisaris Independen: Penggerak Praktik GCG di Perusahaan* (Jakarta: PT. Indeks, 2004), hlm.50

pengaruh yang berhubungan dengan kepentingan pribadi atau pihak lain, serta dapat bertindak secara objektif dan independen dengan berpedoman pada prinsip-prinsip *good corporate governance* (*Transparency, accountability, responsibility, fairness*).<sup>37</sup>

Kriteria komisaris independen menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), yaitu:

- 1) Komisaris independen bukan merupakan anggota manajemen;
- 2) Komisaris independen bukan merupakan pemegang saham mayoritas, atau seorang pejabat atau dengan cara lain yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari perusahaan;
- 3) Komisaris independen dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tidak dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai eksekutif oleh perusahaan lainnya dalam satu kelompok usaha dan tidak pula dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai komisaris setelah tidak lagi menempati posisi seperti itu;
- 4) Komisaris independen bukan merupakan penasihat profesional perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok dengan perusahaan tersebut;
- 5) Komisaris independen bukan merupakan pemasok atau pelanggan yang signifikan dan berpengaruh dari perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok, atau dengan cara lain berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemasok atau pelanggan tersebut;
- 6) Komisaris independen tidak memiliki kontraktual dengan perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok selain sebagai komisaris perusahaan tersebut;
- 7) Komisaris independen harus bebas dari kepentingan dan urusan bisnis apa pun atau hubungan lainnya yang dapat, atau secara wajar dapat dianggap sebagai campur tangan secara material dengan kemampuannya sebagai seorang komisaris untuk bertindak demi kepentingan yang menguntungkan perusahaan.<sup>38</sup>

Pada dasarnya komisaris independen memiliki peranan yang sama dengan komisaris yaitu menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen perusahaan dalam mengelola perusahaan, serta terlaksananya akuntabilitas. Pada intinya, komisaris independen merupakan suatu mekanisme

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm.54-55

<sup>38</sup> *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI). Peranan Dewan komisaris dan Komite Audit dalam pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan) Edisi ke-2 (Jakarta: FCGI,2002),hlm.7

independen (netral) mengawasi dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan. Status independen terfokus kepada tanggung jawab untuk melindungi pemegang saham, khususnya pemegang saham independen atau pemegang saham minoritas dari praktik curang atau melakukan tindak kejahatan di pasar modal.

Peran dari komisaris independen sangat penting pada posisinya dalam dewan komisaris dan dalam melindungi investor. OJK mengungkapkan bahwa,

kedudukan komisaris independen sangat kritikal agar pengambilan keputusan dewan komisaris bersifat objektif dalam mengawasi kinerja manajemen perusahaan. Dari perspektif keagenan, keberadaan komisaris independen dapat mengurangi benturan kepentingan antara pemegang saham dengan manajemen perusahaan, dikarenakan fungsi pengawasannya dapat dilakukan dengan menyuarakan pendapat yang independen dalam rapat.<sup>39</sup>

Menurut Indra Surya dan Ivan Yustiavandana komisaris independen bersama dewan komisaris memiliki tugas-tugas meliputi:

- 1) Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian resiko, anggaran tahunan dan rencana usaha; menetapkan sasaran kerja; mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan; serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan aset. Tugas ini terkait dengan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen (*accountability*);
- 2) Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota dewan direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota dewan direksi yang transparan (*transparency*) dan adil (*fairness*);
- 3) Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan. Tugas ini untuk memberikan perlindungan hak-hak para pemegang saham (*fairness*);

---

<sup>39</sup> Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *op.cit.*, h.50

- 4) Memonitor pelaksanaan *governance*, dan mengadakan perubahan di mana perlu. Komisaris independen harus melaksanakan transparansi (*transparency*) dan pertanggungjawaban (*responsibility*) atas hal ini;
- 5) Memantau proses keterbukaan dan efektivitas komunikasi dalam perusahaan (OECD *principles of Corporate Governance*). Proses keterbukaan (*transparency*) ini untuk menjamin tersedianya informasi yang tepat waktu dan jelas.<sup>40</sup>

Antonius Alijuyo dan Subarto Zaini mengatakan bahwa kehadiran komisaris independen terkait dengan berbagai upaya:

- 1) Untuk menghapuskan praktik-praktik yang dianggap kurang *fair* terutama terhadap pemegang saham public atau terhadap pemegang saham minoritas;
- 2) Untuk dapat menerapkan praktik good corporate governance (GCG) yang secara sederhana dapat diungkapkan sebagai:
  - ✱ “*tell the truth*” yang merupakan refleksi dari prinsip *disclosure*;
  - ✱ “*keep your promise*” dalam hubungannya dengan akuntabilitas dan responsibilitas yang juga merupakan cerminan *ethical behavior*;
  - ✱ “*be fair*” yakni menjunjung *fairness* dan independensi.<sup>41</sup>

Kriteria komisaris independen Menurut keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 Jakarta tanggal 19 Juli 2004 dalam bukunya Indra Surya dan Ivan Yustiavandana menentukan “jumlah minimal komisaris independen adalah 30% dari seluruh anggota dewan komisaris”.<sup>42</sup>

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang perubahan atas peraturan nomor IX.I.6 tentang dewan direksi dan komisaris emiten atau perusahaan publik mengungkapkan pada pasal 6 tentang dewan komisaris:

- 1) Dewan Komisaris paling kurang terdiri atas 2 (dua) orang komisaris, satu di antaranya adalah komisaris independen.
- 2) Dalam hal Dewan komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang komisaris, jumlah komisaris independen paling kurang 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah seluruh anggota komisaris.

<sup>40</sup> Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, *op.cit.*,h. 138

<sup>41</sup> Antonius Alijuyo dan Subarto Zaini, *op.cit.*, hlm. 55

<sup>42</sup> Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, *op.cit.*,hlm. 137

- 3) Salah seorang dari anggota dewan komisaris dapat diangkat menjadi komisaris utama atau presiden komisaris.
- 4) Tata cara pengangkatan komisaris utama atau presiden komisaris dapat diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar atau ditetapkan dalam RUPS.<sup>43</sup>

Badriyah Rifai tentang rasio komisaris independen mengungkapkan bahwa,

Komisaris independen yang jumlahnya secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh yang bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari seluruh jumlah anggota komisaris.<sup>44</sup>

Menurut Badriyah Rifai, “apabila ingin mendapatkan akibat yang berarti terhadap kinerja dewan komisaris, maka keanggotaan komisaris independen harus lebih dari jumlah sehingga dapat outvoted dalam pengambilan keputusan.”<sup>45</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Dewiyani Swami dan MadeYeni (2013), mengukur Komisaris Independen dengan proporsi anggota komisaris independen dari jumlah seluruh anggota komisaris.<sup>46</sup> Menurut Dewiyani Swami dan MadeYeni, “adanya dewan komisaris independen dengan presentase yang tinggi dalam perusahaan diindikasikan dapat mengawasi perilaku oportunistik manajemen, meningkatkan kualitas pengungkapan (*disclosure*) dalam laporan keuangan dan mengurangi manfaat dari penyembunyian informasi”.<sup>47</sup>

---

<sup>43</sup> Lampiran Rancangan Peraturan OJK tentang Perubahan atas Peraturan Nomor IX.I.6 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. (<http://ojk.go.id/permintaan-tanggapan-masyarakat-terkait-rancangan-peraturan-ijk-tentang-perubahan-atas-peraturan-nomor-ix-i-6-tentang-direksi-dan-dewan-komisaris-emiten-atau-perusahaan-publik>) di akses pada 1 Desember 2014

<sup>44</sup> Badriyah Rifai, Peran Komisaris Independen dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di Perusahaan Publik, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 16 Juli 2009: 409

<sup>45</sup> *Ibid*

<sup>46</sup> Ni Putu Dewiyani Swami dan Made Yeni Latrini, Karakteristik Corporate Governance Terhadap Audit Report Lag”, E-Jurnal Akuntansi universitas Udayana 4.3 (2013) ISSN: 2302-8556, hlm. 530-549

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 538

### 3. Komite Audit

Komite audit dibentuk sebagai implementasi dari prinsip-prinsip GCG. Komite ini dibentuk untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi pengelolaan perusahaan. *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) mengungkapkan dalam *Corporate Governance* terdapat tiga komite yang memiliki peranan penting yaitu:

- 1) Komite Kompensasi/ Remunerasi (*Compensation/Remuneration Comitee*) : membuat rekomendasi terhadap keputusan-keputusan yang menyangkut remunerasi/kompensasi untuk dewan direksi dan kebijakan-kebijakan kompensasi lainnya, termasuk hubungan antara prestasi perusahaan dengan kompensasi bagi eksekutif perusahaan dalam hal ini CEO.
- 2) Komite Nominasi (*Nomination/Governance Comitee*) : mengawasi proses pencalonan komisaris dan direksi, menyeleksi para kandidat yang akan dicalonkan, dan mengusulkan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur tentang struktur dewan dan nominasinya.
- 3) Komite Audit (*Audit Comitee*) : memberikan suatu pandangan tentang masalah akuntansi, laporan keuangan dan penjelasannya, sistem pengawasan internal serta auditor independen.<sup>48</sup>

Untuk dapat bekerja secara tepat guna dalam suatu lingkungan usaha yang kompleks, dewan komisaris harus mendelegasikan beberapa tugas mereka kepada komite-komite. Adanya komite-komite ini merupakan suatu sistem yang bermanfaat untuk dapat melaksanakan pekerjaan komisaris secara lebih rinci dengan memusatkan perhatian dewan komisaris kepada bidang khusus perusahaan atau cara pengelolaan (*governance*) yang lebih baik oleh manajemen.

Menurut Hiro Tugiman pengertian komite audit adalah sebagai berikut:

Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan

---

<sup>48</sup> *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), *op.cit.*, hlm.11



klien yang bertanggung jawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen.<sup>49</sup>

Menurut Indra Surya dan Ivan Yustiavandana,

Komite audit adalah organ tambahan yang diperlukan dalam prinsip GCG. Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan serta melaksanakan tugas penting berkaitan dengan sistem pelaporan keuangan.<sup>50</sup>

Menurut Dewiyani Swami dan Yeni Latrini pengertian komite audit adalah “komite yang membantu dewan komisaris dalam memastikan konsistensi penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* terutama transparansi dan oleh para eksekutif.”<sup>51</sup>

OJK mengatakan, “ketentuan yang berlaku di pasar modal mewajibkan emiten atau perusahaan publik membentuk komite audit”.<sup>52</sup>

Komite audit secara resmi diberlakukan di Indonesia sejak juni 2000, dengan dikeluarkannya keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No: Ke-315/BEJ/06/2000. Kemudian, dalam Keputusan ketua BAPEPAM No. Kep-29/PM/2004 tentang peraturan Nomor IX.1.5: Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Komite Audit.<sup>53</sup>

Kebutuhan akan komite audit disebabkan belum memadainya peran pengawasan dan akuntabilitas dewan komisaris perusahaan. Irna Juliana mengatakan bahwa

---

<sup>49</sup> Hiro Tugiman, *Komite Audit* (Bandung: PT. Eresko,1995),hlm.8

<sup>50</sup> Indra Surya dan Ivan Yustavandana, *op.cit.*,hlm.145

<sup>51</sup> Ni Putu Dewiyani Swami dan Made Yeni Latrini, *op.cit.*, hlm 538

<sup>52</sup> Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *op.cit.*,hlm.57

<sup>53</sup> Komang Ratna W. dan Ketut Ali S.,”Pengaruh Karakteristik Komite audit Terhadap *Timeliness* Pelaporan Keuangan: Perusahaan *Go Public* Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 6.1, 2014, ISSN;2302-8566,hlm.155

salah satu tujuan pembentukan komite audit adalah untuk meningkatkan fungsi pengawasan dewan komisaris sebagai salah satu struktur tata kelola. Peran, tujuan, dan manfaat komite audit bagi penegakan GCG di perusahaan mengalir dari fungsi pengawasan dewan komisaris.<sup>54</sup>

Ridwan Khairandy dan Camelia Malik mengungkapkan pedoman GCG menyatakan bahwa

Dewan Komisaris wajib membentuk komite audit yang beranggotakan satu atau lebih anggota dewan komisaris. Dewan dapat meminta kalangan luar dengan berbagai keahlian, pengalaman, dan kualitas lain yang dibutuhkan, untuk duduk sebagai anggota komite audit. Komite audit harus bebas dari pengaruh direksi, eksternal auditor. Dengan demikian, komite audit hanya bertanggungjawab kepada dewan komisaris. Penggantian anggota komite audit harus mendapat persetujuan lebih dari 50% jumlah anggota komisaris.<sup>55</sup>

Menurut Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, syarat suatu komite audit adalah sebagai berikut :

- 1) Komite audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris;
- 2) Komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang komisaris independen dan sekurang-kurangnya (2) orang anggota lainnya berasal dari luar emiten atau perusahaan publik;
- 3) Memiliki integritas yang tinggi. Kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai sesuai latar belakang kependidikannya, seta mampu berkomunikasi dengan baik;
- 4) Salah seorang dari anggota komite audit memiliki latar belakang pendidikan keuangan dan akuntansi;
- 5) Memiliki pengetahuan cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan;
- 6) Bukan orang dalam kantor akuntan publik yang memberikan jasa audit dan/ atau non-audit pada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam 1 tahun terakhir sebelum diangkat oleh komisaris sebagaimana dimaksud dalam peraturan VII.A.2 tentang independensi akuntan yang memberikan jasa audit di pasar modal;
- 7) Bukan merupakan karyawan kunci emiten atau perusahaan publik dalam 1 tahun terakhir sebelum diangkat komisaris;
- 8) Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik. Dalam hal anggota komite audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum, maka dalam jangka

---

<sup>54</sup> Irna Juliana Sitorus, *op.cit.*, hlm.662

<sup>55</sup> Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *op.cit.*, hlm.136

- waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain;
- 9) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten, komisaris, direktur, atau pemegang saham utama emiten;
  - 10) Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten;
  - 11) Tidak merangkap sebagai anggota komite audit pada emiten atau perusahaan publik lain;
  - 12) Sekretaris perusahaan harus bertindak sebagai sekretaris komite audit.<sup>56</sup>

Komite Audit memiliki tugas terpisah dalam membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh. Menurut FCGI, Pada umumnya komite audit mempunyai tanggung jawab pada tiga bidang, yaitu:

- 1) Laporan keuangan (*financial reporting*)  
Tanggung jawab komite audit dibidang laporan keuangan adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat manajemen telah memberikan gambaran sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usaha, dan rencana dan komitmen perusahaan jangka panjang.
- 2) Tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*)  
Tanggung jawab komite audit dalam bidang tata kelola perusahaan adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku dan beretika, melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.
- 3) Pengawasan perusahaan (*Corporate Control*)  
Komite audit bertanggung jawab untuk pengawasan perusahaan termasuk di dalamnya hal-hal yang berpotensi mengandung resiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh audit internal.<sup>57</sup>

Ridwan Khairandy dan Camelia Malik menyatakan bahwa komite audit independen di dalam suatu perseroan mempunyai peran dan tanggung jawab untuk:

- 1) Mengkaji laporan keuangan tahunan perusahaan dan memastikan dewan direksi menyetujuinya;
- 2) Menjaga hubungan dengan auditor eksternal dan internal; dan

<sup>56</sup> Indra Surya dan Ivan Yustavandana, *op.cit.*,hlm.146-147

<sup>57</sup> *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), *op.cit.*,hlm.12

- 3) Mengkaji control internal surat-surat manajemen.<sup>58</sup>

Indra surya dan Ivan Yustiavandana mengungkapkan menurut pedoman GCG, tugas dan tanggung jawab komite audit adalah sebagai berikut:

- 1) Mendorong terbentuknya struktur pengawasan intern yang memadai. Adanya pengawasan intern ditujukan untuk mewujudkan prinsip pertanggung jawaban (*responsibility*) agar organ-organ perusahaan melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya berdasarkan aturan yang ada;
- 2) Meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan. prinsip transparansi (*transparency*) dikembangkan dalam tugas ini;
- 3) Mengkaji ruang lingkup dan ketepatan eksternal audit, kewajaran biaya audit, serta kemandirian dan objektivitas eksternal auditor. Komite audit dalam hal ini menjalankan prinsip akuntabilitas (*accountability*);
- 4) Mempersiapkan surat uraian tugas dan tanggung jawab komite audit selama tahun buku yang sedang diperiksa eksternal audit. Hal ini terkait dengan prinsip pertanggung jawaban (*responsibility*).<sup>59</sup>

Peraturan BAPEPAM mengenai pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit diperbarui menjadi “keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: Kep-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 peraturan IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.”<sup>60</sup>

Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa, “komite audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan dari pihak luar emiten atau perusahaan publik.”<sup>61</sup> Peraturan ini masih dipergunakan oleh OJK yang mulai menggantikan fungsi BAPEPAM-LK pada 1 Januari 2013.

---

<sup>58</sup> Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, op.cit., hlm.133

<sup>59</sup> Indra Surya dan Ivan Yustavandana, op.cit., hlm.149

<sup>60</sup> Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor: Kep-643/BL/2012 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit (<http://www.ojk.go.id/Files/regulasi/pasar-modal/bapepam-pm/emiten-pp/peraturan-lain/6.IX.1.5.pdf>) diakses pada tanggal 1 Desember 2014

<sup>61</sup> *Ibid*

Suaryana dalam Dewiyani Swami dan Made Yeni mengatakan bahwa, “Anggota Komite Audit minimal 3 orang, diketuai oleh salah satu dewan komisaris independen dan anggota lainnya merupakan pihak luar yang independen serta salah satunya memiliki kemampuan di bidang akuntansi”.<sup>62</sup>

Hotman et al, dalam penelitiannya mengukur kompetensi komite audit dari proporsi jumlah anggota komite audit yang memiliki keahlian keuangan dengan jumlah anggota komite keseluruhan. Menurut Ika dan Ghazali (2011) dalam Hotman et al, sebagai ahli keuangan dan memiliki kompetensi pada bidangnya, mereka diharapkan dapat memimpin komite audit dalam mengidentifikasi, mengajukan pertanyaan, baik kepada manajemen maupun auditor eksternal yang dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.<sup>63</sup>

## **B. Hasil Penelitian yang Relevan**

### **1. Penelitian Gine Das Prena**

Penelitian yang berjudul “ Pengaruh Keberadaan Komisaris Independen pada Kecepatan Penyerahan Laporan Keuangan Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.” Penelitian tersebut dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008 dan metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Ni Putu Dewiyani Swami dan Made Yeni Latrini, *op.cit.*, hlm 539

<sup>63</sup> Hotman et al, “Karakteristik Komite Audit dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”, *Simposium Nasional Akuntansi XVI, Manado*, 25-28 September 2013, hlm, 1843-1926

<sup>64</sup> Gine Das Prena, “Pengaruh Keberadaan Komisaris Independen pada Kecepatan Penyerahan Laporan Keuangan Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek di Indonesia”, *Jurnal Riset Akuntansi (JUARA)*, Vol. 2, No.1, Feb 2012, hlm.22-30

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori keagenan (*agency theory*). Penyajian keuangan yang andal dan relevan merupakan ukuran yang diharapkan oleh pihak prinsipal dari pihak agen pelaksana perusahaan mereka. Peneliti juga menggunakan teori pensinyalan (*Signalling Theory*). Teori pensinyalan menjelaskan alasan perusahaan memiliki insentif untuk melaporkan laporan keuangan secara sukarela informasi ke pasar modal meskipun tidak ada mandat dari badan regulasi. Peneliti juga menggunakan konsep *good corporate governance* (GCG) yang didefinisikan sebagai struktur, sistem dan proses yang digunakan oleh bagian perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang. Syarat pencapaian GCG adalah ditunjukkannya suatu sistem yang mencerminkan kepatuhan dan keteraturan operasional perusahaan. Dalam kaitannya dengan upaya menjalankan GCG komisaris independen perlu mengerti dan menjalankan tugasnya dengan mengacu pada prinsip-prinsip GCG yang salah satunya adalah prinsip akuntabilitas yang berkaitan dengan pertanggungjawaban atas keputusan manjerial dan hasil kerja usaha yang dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab dalam mengelola perusahaan. Pihak agen perlu menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit secara rutin dan tepat waktu kepada publik.

## 2. Penelitian Roswita Savitri

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan: Studi pada Perusahaan

---

Manufaktur di BEI.” Penelitian tersebut dilakukan pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2006-2008 dan metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*.<sup>65</sup>

Dalam penelitian ini terdapat variabel independen komisis independen dan komite audit dan variabel dependen ketepatan waktu pelaporan keuangan. Penelitian ini menggunakan teori sinyal (*signalling theory*). *Signaling theory* menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal, karena terdapat asimetri informasi (*Asymmetri Information*) antara perusahaan dan pihak luar. Perusahaan (*agent*) mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang daripada pihak luar (investor, kreditor). Kurangnya informasi pihak luar mengenai perusahaan menyebabkan mereka melindungi diri mereka dengan memberikan harga yang rendah untuk perusahaan. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan, dengan mengurangi asimetri informasi. Salah satu cara untuk mengurangi informasi asimetri adalah dengan memberikan sinyal pada pihak luar, salah satunya berupa informasi keuangan yang dapat dipercaya dan akan mengurangi ketidakpastian mengenai prospek perusahaan yang akan datang (Wolk et al., 2000 dalam Jama'an, 2008 ).

Teori *signal* juga dapat membantu pihak perusahaan (*agent*), pemilik (*prinsipal*), dan pihak luar perusahaan mengurangi asimetri informasi dengan menghasilkan kualitas pelaporan keuangan. Untuk memastikan pihak-pihak yang

---

<sup>65</sup> Roswita Savitri, “ Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan: Studi pada Perusahaan Manufaktur di BEI”, Skripsi, laporan penelitian, Universitas Diponegoro

berkepentingan menyakini keandalan informasi keuangan yang disampaikan pihak perusahaan (*agent*), perlu mendapatkan opini dari pihak lain yang bebas memberikan pendapat tentang laporan keuangan.

### 3. Penelitian Purwati

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pada Perusahaan Publik Yang Tercatat Di BEJ.” Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2006 terhadap perusahaan-perusahaan publik yang terdaftar di BEJ tahun 2003 dan 2004. Secara khusus, Studi ini mencoba untuk menyelidiki Pengaruh Keanggotaan komite audit, Independensi Anggota Komite Audit, Proporsi Komisaris independen, Ketua Komite Audit, serta Kompetensi Komite Audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan yang listing di BEJ. Dalam penelitian ini mengatakan bahwa Soo dan Schwartz (1999) mengukur keterlambatan pelaporan berdasarkan pada kepatuhan perusahaan terhadap peraturan pelaporan informasi keuangan yang ditetapkan oleh SEC, dalam penelitian ini ketepatan waktu pelaporan keuangan diukur dengan *dummy variabel* dimana kategori 0 untuk tidak tepat waktu dan kategori 1 untuk tepat waktu. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi logistik untuk menguji apakah variabel-variabel keanggotaan komite audit, Independensi Anggota Komite Audit, Proporsi Komisaris independen, Ketua Komite Audit, serta Kompetensi Komite Audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Purwati, “Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pada Perusahaan Publik Yang Tercatat Di BEJ.” Thesis, , laporan penelitian, Universitas Diponegoro.



### C. Kerangka teoretik

Ketepatan waktu pelaporan keuangan, berkaitan erat dengan relevansi yang merupakan kualitas dari laporan keuangan dan prinsip-prinsip *dari Good Corporate Governance* pada emiten di pasar modal. hubungan antara pihak agen (manajemen) dan prinsipal (pemilik usaha) sesuai dengan teori keagenan (*Agency Theory*). Menurut Belkaoui, “agar relevan, informasi harus tersedia untuk para pengambil keputusan sebelum ia kehilangan kapasitasnya untuk memengaruhi pengambilan keputusan (ketepatan waktu).”<sup>67</sup>

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara *agent* (manajemen) dan *Principal* (pemilik usaha). GCG merupakan sebuah konsep yang merupakan pengembangan dari teori keagenan (*Agency Theory*) Pihak agen atau manajemen dalam pasar modal dituntut untuk dapat memberikan perlindungan terhadap prinsipal atau para pemegang saham termasuk di dalamnya adalah untuk mendapatkan informasi yang benar, akurat, dan tepat pada waktunya mengenai perusahaan, mengenai kinerja suatu perusahaan, hasil keuangan dan operasionalnya, dan informasi mengenai tujuan perusahaan. Sehingga para pemegang saham dapat mengambil berbagai keputusan terkait dengan investasinya di perusahaan.

Dalam perusahaan, komisaris independen berperan dalam mewakili kepentingan pemegang saham minoritas, komisaris independen berperan agar perusahaan dapat menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

---

<sup>67</sup> Ahmed Riahi-Belakoui, *op.cit*, hlm.238

(GCG) komisaris independen sendiri merupakan salah satu dari mekanisme GCG agar perusahaan dapat mewujudkan GCG.

Indra Surya dan Ivan Yustiavandana mengatakan bahwa “Salah satu tugas utama komisaris independen bersama dewan komisaris yaitu memantau proses keterbukaan dan efektivitas komunikasi dalam perusahaan. Proses keterbukaan (*transparency*) ini untuk menjamin tersedianya informasi yang tepat waktu dan jelas”.<sup>68</sup>

Menurut Gine Das Prena,

“Komisaris Independen berfungsi untuk mengawasi jalannya perusahaan dengan memastikan bahwa perusahaan tersebut telah memastikan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan praktek transparansi, pengungkapan, kemandirian, akuntabilitas, dan prinsip keadilan. Emiten yang memiliki komisaris independen dapat mendesak pihak manajemen perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan audit ke publik lebih tepat waktu dibandingkan yang tidak memiliki komisaris independen.”<sup>69</sup>

Dewiyani Swami dan Yeni Latrini mengatakan “pengawasan dari dewan komisaris independen akan membantu mengurangi adanya penyembunyian informasi dan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen sehingga luas dan waktu pekerjaan audit dapat berkurang.”<sup>70</sup> Hal ini berarti bahwa pengawasan dari dewan komisaris independen akan meningkatkan ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Komite Audit juga merupakan salah satu dari mekanisme GCG. Komite audit dibentuk untuk membantu komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan

---

<sup>68</sup> Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 149

<sup>69</sup> Gine Das Prena, “Pengaruh Keberadaan Komisaris Independen pada Kecepatan Penyerahan Laporan Keuangan Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek di Indonesia”, *Jurnal Riset Akuntansi (JUARA)*, Vol. 2, No.1, Feb 2012, hlm.23

<sup>70</sup> Ni Putu Dewiyani Swami dan Yeni Latrini, “Pengaruh Karakteristik Corporate Governance Terhadap Audit Report Lag”, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 4.3.2013, hlm.533

yang berkaitan dengan sistem pelaporan keuangan. Indra Surya dan Ivan Yustiavandana mengatakan bahwa “Proses keterbukaan (*transparency*) adalah untuk menjamin tersedianya informasi yang tepat waktu dan jelas”.<sup>71</sup> Indra Surya dan Ivan Yustiavandana juga mengatakan bahwa “menurut pedoman GCG, salah satu tugas dan tanggung jawab komite audit adalah meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan. Prinsip transparansi (*transparency*) dikembangkan dalam tugas ini”.<sup>72</sup>

Naimi *et al* (2010), mengatakan bahwa semakin banyak anggota komite audit dan semakin banyak pertemuan akan meningkatkan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan.<sup>73</sup>

Ratna Widyaswari dan Alit Suardana mengatakan bahwa “Komite audit harus memiliki setidaknya satu orang anggota yang memiliki keahlian dalam bidang keuangan. Keahlian yang dimiliki ini dapat diimplementasikan dalam proses pelaporan keuangan, sehingga laporan keuangan dapat memiliki informasi yang relevan dan yang terpenting dipublikasikan tepat pada waktunya”.<sup>74</sup> Komite Audit yang memiliki keahlian dalam bidang keuangan diharapkan dapat memimpin komite audit dalam mengidentifikasi, mengajukan pertanyaan, baik kepada manajemen maupun auditor eksternal yang dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan

---

<sup>71</sup> Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 149

<sup>72</sup> Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, *op.cit.*, hlm. 149

<sup>73</sup> Mohammad Naimi et al, “*Corporate Governance and Audit Report Lag in Malaysia*. *Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance*, Vol 6, pp. 57-84

<sup>74</sup> Komang Ratna W. dan Ketut Ali S., “Pengaruh Karakteristik Komite audit Terhadap *Timeliness* Pelaporan Keuangan: Perusahaan *Go Public* Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 6.1, 2014, ISSN;2302-8566, hlm.157

Komisaris independen dan komite audit yang merupakan bagian dari mekanisme GCG sangat berperan penting dalam pengimplementasian prinsip-prinsip GCG dalam perusahaan di pasar modal. Komisaris independen memiliki fungsi pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan salah satunya adalah memantau proses keterbukaan dan efektivitas komunikasi dalam perusahaan yang menjamin tersedianya informasi yang tepat waktu dan jelas. Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu komisaris mengawasi pengelolaan perusahaan yang berkaitan dengan sistem pelaporan keuangan.

Pramana Putra dan Ramantha mengungkapkan bahwa,

Komite Audit merupakan komite bentukan dewan komisaris yang tanggung jawabnya kepada dewan komisaris. Komite audit juga membantu dewan komisaris untuk mengawasi proses mengolah informasi keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan.<sup>75</sup>

Ridwan Khairandy dan Camelia Malik mengatakan bahwa,

“Prinsip akuntabilitas yang merupakan salah satu prinsip GCG diwujudkan antara lain dengan menyiapkan laporan keuangan (*financial statement*) dengan akurat, tepat pada waktunya, dan dengan cara yang tepat pula; mengembangkan komite audit dan risiko untuk mendukung fungsi pengawasan dewan komisaris; mengembangkan dan merumuskan kembali peran dan fungsi *internal audit* sebagai mitra bisnis strategis berdasarkan *best practice* (dan bukan hanya sekedar audit), menangani segala bentuk perselisihan; penegakan hukum dalam perusahaan (melalui sistem penghargaan dan sanksi) penggunaan *external auditor* yang memenuhi syarat (berbasis profesionalisme)”<sup>76</sup>.

Mas Achmad Daniri mengatakan bahwa,

“Dewan komisaris dan direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan telah menyajikan laporan keuangan dan hasil-hasil operasi perusahaan dengan penuh integritas. Laporan keuangan perusahaan harus bersifat faktual, tepat waktu, dan disajikan dengan jelas

---

<sup>75</sup> I Gede Ari Pramana P. dan I Wayan Ramantha, “Pengaruh Profitabilitas, Umur Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, dan Komite Audit pada Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Tahunan”, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 10.1 (2015) ISSN: 2302-8578, hlm. 199-213

<sup>76</sup> Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *op.cit.*, hlm.93

dan seimbang.<sup>77</sup> Pada umumnya, banyak dari pekerjaan dewan komisaris dilaksanakan melalui komite. Namun, dalam pandangan investor dan kreditor, adanya komite justru berpotensi menjadikan corporate governance berjalan lebih efektif. Karena itu tak heran, bursa efek mewajibkan perusahaan tercatat untuk memiliki komite audit yang dipimpin oleh komisaris independen.”<sup>78</sup>

Pada penelitian ini variabel independen yaitu Variabel X<sub>1</sub> adalah Komisaris Independen dan Variabel X<sub>2</sub> adalah Komite Audit memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yaitu Variabel Y adalah Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan.

Pada penelitian ini variabel independen yaitu Variabel X<sub>1</sub> adalah Komisaris Independen dan Variabel X<sub>2</sub> adalah Komite Audit memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yaitu Variabel Y adalah Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan.

#### **D. Perumusan Hipotesis**

Berdasarkan deskripsi teoretis dan kerangka berfikir diatas, maka hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh antara komisaris independen terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan
2. Terdapat pengaruh antara komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan
3. Terdapat pengaruh antara komisaris independen dan komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan

---

<sup>77</sup> Mas Achmad Daniri, *LEAD BY GCG* (Jakarta : Gagas Bisnis, 2014), hlm. 245

<sup>78</sup> *Ibid*,249

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris dan untuk mendapatkan pengetahuan yang tepat dan dapat diandalkan tentang Pengaruh Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur di BEI.

#### **B. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2015 sampai dengan Januari 2016, terdiri dari tiga tahap yaitu, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pengolahan data.

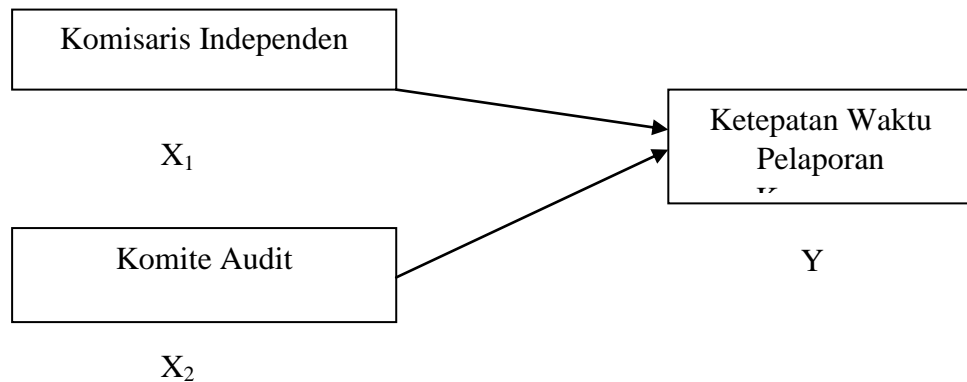
#### **C. Metode Penelitian**

Metode Penelitian ini menggunakan data sekunder diperoleh dari laporan keuangan perusahaan manufaktur yang dipublikasikan secara umum dan terdaftar di BEI tahun 2014.

Konstelasi pengaruh antar variabel dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan arah atau gambaran dari penelitian ini, jadi terlihat secara jelas yang dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar III.1**

**Konstelasi Hubungan Antar Variabel**



Keterangan :

Variabel Bebas ( $X_1$ ) : Komisaris Independen

Variabel Bebas ( $X_2$ ) : Komite Audit

Variabel Terikat ( $Y$ ) : Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

—————> : Arah Hubungan

**D. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel**

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel dipilih dengan metode *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan kriteria tertentu. Kriteria-kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel antara lain sebagai berikut: 1) Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014; 2) Perusahaan yang memiliki data mengenai tanggal penyampaian laporan keuangan; 3) Memiliki data yang lengkap mengenai komisaris independen dan komite audit.

Tabel.III.1

## HASIL SELEKSI SAMPEL KRITERIA

NO	KRITERIA	Jumlah
1	Jumlah data perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014	142
2	Tidak memiliki tanggal penyerahan laporan keuangan	(15)
3	Tidak memiliki data yang lengkap mengenai komisaris independen dan komite audit	(33)
4	Data <i>outlier</i>	(2)
	Jumlah Sampel	92

**E. Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu data komisaris independen, data komite audit, dan laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur beserta data tanggal penyampaian laporan keuangan.

Data komisaris independen dan komite audit terdapat pada laporan keuangan tahunan (*annual report*) perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 *download* di website *www.idx.co.id*. Laporan keuangan tahunan (*annual report*) perusahaan manufaktur dan data mengenai tanggal penyampaian laporan keuangan diperoleh dari *www.icamel.co.id* mengenai tanggal penyampaian LK 2014.



## **F. Instrumen Penelitian**

### **1. Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan**

#### **a. Definisi Konseptual**

Ketepatan waktu pelaporan keuangan adalah informasi harus tersedia untuk para pengambil keputusan sebelum ia kehilangan kapasitasnya untuk memengaruhi pengambilan keputusan.

#### **b. Definisi Operasional**

Variabel ketepatan waktu diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, dimana kategori 0, untuk perusahaan yang tidak tepat waktu dan kategori 1, untuk perusahaan tepat waktu.

Dalam penelitian ini nilai tersebut diperoleh dari data dokumentasi berupa data tanggal penyampaian laporan keuangan tahunan (*annual report*) 2014 dari *www.icamel.co.id*, Data yang diambil adalah tanggal penyampaian laporan keuangan perusahaan manufaktur tahun 2014.

### **2. Komisaris Independen**

#### **a. Definisi Konseptual**

Komisaris independen adalah Komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat, atau dengan cara lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan.

#### **b. Definisi Operasional**

Variabel komisaris independen diukur dari proporsi jumlah komisaris independen yang dengan menggunakan indikator persentase dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dari seluruh jumlah anggota dewan komisaris perusahaan. Data diperoleh dari data dokumentasi berupa laporan keuangan tahunan perusahaan yang dipublikasikan oleh BEI (Bursa Efek Indonesia) tahun 2014.

### **3. Komite Audit**

#### **a. Definisi Konseptual**

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bertugas melaksanakan pengawasan atas proses pelaporan keuangan.

#### **b. Definisi Operasional**

Variabel Komite Audit diukur dari proporsi anggota Komite Audit yang kompeten dalam bidang finansial dengan jumlah anggota komite audit. Data diperoleh dari data dokumentasi berupa laporan keuangan tahunan perusahaan yang dipublikasikan oleh BEI (Bursa Efek Indonesia) tahun 2014.

### **G. Teknik Analisis Data**

. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik karena variabel terikat (*dependent*) yang digunakan adalah variabel *dummy*. Teknik analisis ini dipilih sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara variabel-variabel yang diteliti yaitu ketepatan waktu pelaporan keuangan sebagai variabel terikat, komisaris

independen sebagai variabel bebas pertama, dan komite audit sebagai variabel bebas kedua.

Penelitian yang menggunakan regresi logistik biner dalam teknik analisis data tidak memerlukan lagi uji normalitas pada variabel bebasnya (Ghozali, 2011) dan mengabaikan heteroskedastisitas (Gujarati, 2003)

Model regresi logit yang digunakan untuk menguji hipotesis sebagai berikut:

$$\ln \frac{TL}{1-TL} = \beta_0 + \beta_1 \text{KOMIN} + \beta_2 \text{KOMPT} + \epsilon.$$

$\ln \frac{TL}{1-TL}$  = Dummy variabel ketepatan waktu pelaporan.

KOMIN = Proporsi Komisaris Independen

KOMPT = Kompetensi Anggota Komite Audit

$\epsilon$  = Error

Analisis pengujian dengan regresi logistik memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menilai kelayakan model regresi

Perhatikan output dari Hosmer dan Lemeshow, dengan Hipotesis:

Ho : Tidak ada perbedaan yang nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati.

Hi : Ada perbedaan yang nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati.

Dasar pengambilan keputusan:

Perhatikan nilai *goodness of fit Test* yang diukur dengan *Chi-Square* pada bagian bawah uji Hosmer dan Lemeshow:

- Jika probabilitas  $> 0,05$  Ho diterima.
- Jika probabilitas  $< 0,05$  Ho ditolak.

## 2. Menilai keseluruhan model (*overall model fit*)

Perhatikan angka  $-2 \text{ Log Likelihood (LL)}$  pada awal (Blok Number = 0) dan angka  $-2 \text{ Log Likelihood}$  pada Blok Number = 1. Jika terjadi penurunan angka  $-2 \text{ Log Likelihood}$  (Blok Number 0 – Blok Number 1) menunjukkan model regresi yang baik. *Log Likelihood* pada regresi logistik mirip dengan pengertian "*sum squared error*" pada model regresi, sehingga penurunan *Log Likelihood* menunjukkan model regresi yang baik.

## 3. Menguji koefisien regresi

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam uji koefisien regresi adalah :

- Tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) yang digunakan sebesar 10%. Mason (1999) menyebutkan bahwa tidak terdapat satu level signifikan yang diaplikasikan untuk semua pengujian. Pada umumnya level 5% (0,05) untuk riset konsumen, level 1% (0,01) untuk *quality insurance* dan level 10% untuk *political polling*.
- Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis didasarkan pada signifikansi *pvalue (probability value)*. Jika *p-value (signifikan)*  $> \alpha$ , maka hipotesis Alternatif ditolak. Sebaliknya jika *p-value (signifikan)*  $< \alpha$ , maka hipotesis diterima.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Data**

Variabel yang ada dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yaitu satu variabel dependen, dua variabel independen. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi, dan dalam penelitian ini adalah ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sedangkan untuk variabel independen dalam penelitian ini adalah komisaris independen dan komite audit, variabel ini merupakan variabel yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sebanyak 92 perusahaan. Jumlah data tersebut didasarkan pada ketersediaan dan kelengkapan data penelitian dari laporan keuangan tahunan tahun 2014. Dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu sampel yang dipilih dari populasi dengan kriteria tertentu.

Berikut ini disajikan statistik deskriptif untuk masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

**TABEL IV.1**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Timeliness	92	.00	1.00	.8370	.37143
Komin	92	29.00	80.00	40.4022	10.43984
Kompt	92	25.00	100.00	74.3804	23.86631
Valid N (listwise)	92				

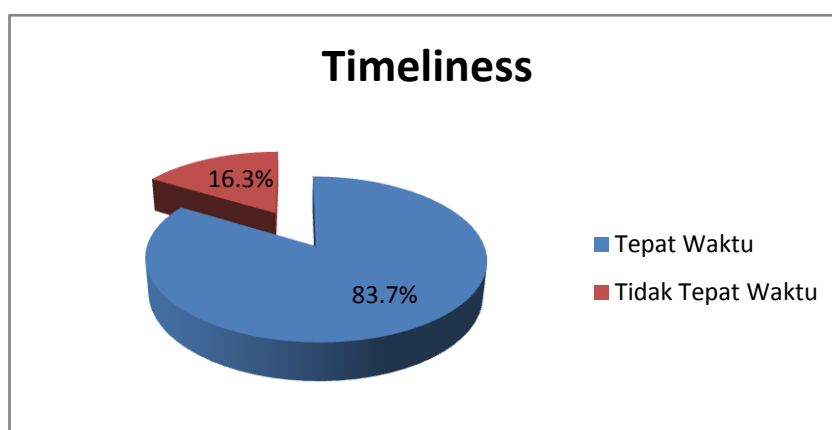
Sumber : Data sekunder diolah dengan menggunakan spss 16

### 1. Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan kualitas laporan keuangan dari segi waktu. Ketepatan waktu laporan keuangan diukur dengan variabel *dummy* dimana kategori 0 untuk tidak tepat waktu dan kategori 1 untuk tepat waktu. Berikut grafik persentase perusahaan-perusahaan yang menyampaikan laporan keuangan tidak tepat waktu dan tepat waktu.

Gambar IV.1

Diagram *Pie* Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan



Berdasarkan Gambar grafik tersebut dapat dilihat bahwa persentase perusahaan yang menyampaikan laporan keuangannya tidak tepat waktu sebesar

16,3 % dan perusahaan yang menyampaikan laporan keuangannya tepat waktu sebesar 83,7 %.

## 2. Komisaris Independen

Komisaris Independen merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan (tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan) yang dipilih secara transparan dan independen, memiliki integritas dan kompetensi yang memadai, bebas dari pengaruh yang berhubungan dengan kepentingan pribadi atau pihak lain, serta dapat bertindak secara objektif dan independen dengan berpedoman pada prinsip-prinsip *good corporate governance*. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang perubahan atas peraturan nomor IX.I.6 tentang dewan direksi dan komisaris emiten atau perusahaan publik mengungkapkan pada pasal 6 tentang dewan komisaris, dalam hal dewan komisaris terdiri dari lebih 2 (dua) orang komisaris, jumlah komisaris independen paling kurang 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah seluruh anggota komisaris.

Pada tabel IV.1 tampak bahwa Komisaris Independen menunjukkan rata-rata sebesar 40,40, dengan standar deviasi sebesar 10,43, serta nilai maksimum adalah 80 dan minimum adalah 29. Hal tersebut berarti perusahaan-perusahaan manufaktur rata-rata 40,40 % dan telah memenuhi peraturan yang ditetapkan yaitu minimal memiliki 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris. Distribusi frekuensi dan grafik histogram dari data Komisaris Independen dapat dilihat pada tabel IV.2 di bawah ini, dimana rentang kelas adalah 51, banyak kelas interval 7, dan panjang kelas adalah 7 Untuk menentukan kelas interval menggunakan rumus Sturges  $K = 1 + 3,3 \log n$ .

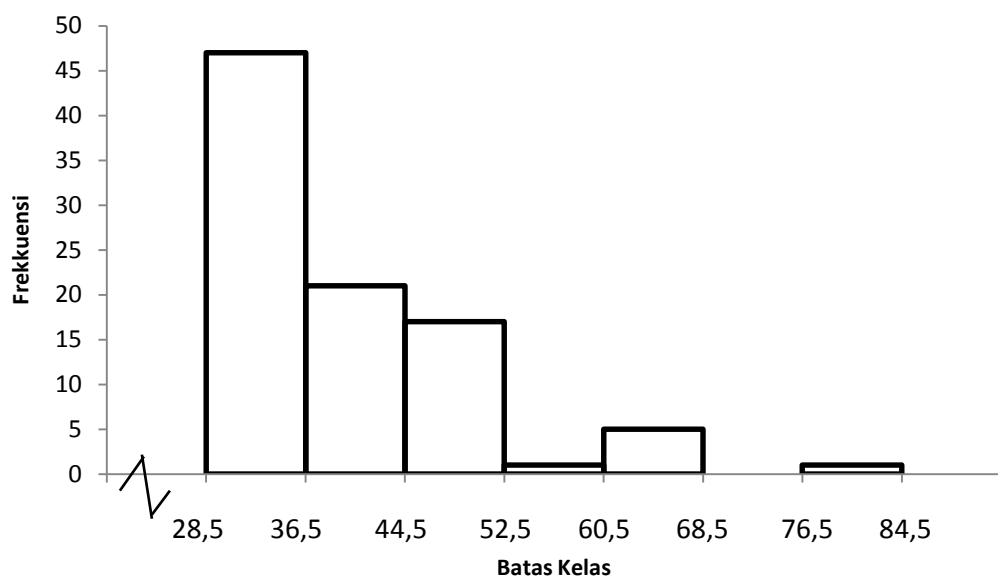
Tabel Distribusi Frekuensi dan Grafik Histogram Komisaris Independen yang terdapat dalam perusahaan adalah sebagai berikut :

Tabel IV.2  
Distribusi Frekuensi Komisaris Independen

Kelas Interval	Batas Bawah	Batas Atas	Frek. Absolut	Frek. Relatif
29 - 36	28,5	36,5	47	51.1%
37 - 44	36,5	44,5	21	22.8%
45 - 52	44,5	52,5	17	18.5%
53 - 60	52,5	60,5	1	1.1%
61 - 68	60,5	68,5	5	5.4%
69 - 76	68,5	76,5	0	0.0%
77 - 84	76,5	84,5	1	1.1%
Total			92	100%

Gambar IV.2

Grafik Histogram Komisaris Independen





Berdasarkan tabel IV.2 Distribusi Frekuensi Komisaris Independen menunjukkan nilai 0 yang terdapat pada rentang 69-76 (dalam persen). Hal ini disebabkan karena perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2014 tidak memiliki jumlah proporsi komisaris independen pada kisaran tersebut. Komisaris Independen dengan proporsi yang paling kecil yaitu dikisaran 29-36 sebanyak 47 perusahaan sedangkan yang paling besar yaitu dikisaran 77-84 sebanyak satu perusahaan. Menurut regulasi bahwa setiap perusahaan harus memiliki 30% Komisaris Independen, maka hampir seluruh perusahaan manufaktur telah mematuhi regulasi yang ada.

### 3. Komite Audit

Komite Audit adalah organ tambahan yang diperlukan dalam prinsip GCG. Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan serta melaksanakan tugas penting berkaitan dengan sistem pelaporan keuangan. Salah satu syarat dari komite audit adalah salah seorang dari anggota komite audit memiliki latar belakang pendidikan keuangan dan akuntansi.

Pada tabel IV.1 anggota komite audit yang memiliki kompetensi dalam bidang keuangan atau finansial menunjukkan rata-rata sebesar 74,38, dengan standar deviasi sebesar 23,86 serta nilai maksimum adalah 100 dan minimum adalah 25. Hal tersebut berarti perusahaan-perusahaan manufaktur telah memiliki anggota komite audit yang memiliki kompetensi dalam bidang finansial adalah sebesar 74,38%. Distribusi frekuensi dan grafik histogram dari data Komite Audit

dapat dilihat pada tabel IV.3 di bawah ini, dimana rentang kelas adalah 51, banyak kelas interval 7, dan panjang kelas adalah 10 Untuk menentukan kelas interval menggunakan rumus Sturges  $K = 1 + 3,3 \log n$ .

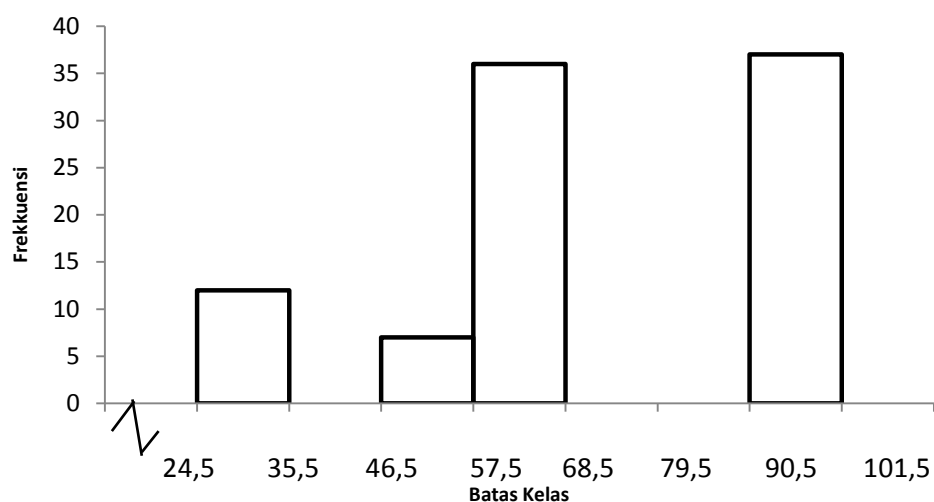
Tabel Distribusi Frekuensi dan Grafik Histogram Komite Audit yang memiliki kompetensi di bidang finansial adalah sebagai berikut .:

Tabel IV.3  
Distribusi Frekuensi Komite Audit

Kelas Interval	Batas Bawah	Batas Atas	Frek. Absolut	Frek. Relatif
25 - 35	24,5	35,5	12	13.0%
36 - 46	35,5	46,5	0	0.0%
47 - 57	46,5	57,5	7	7.6%
58 - 68	57,5	68,5	36	39.1%
69 - 79	68,5	79,5	0	0.0%
80 - 90	79,5	90,5	0	0.0%
91 - 101	90,5	101,5	37	40.2%
Total			92	100%

Gambar IV.3

Grafik Histogram Komite Audit



Berdasarkan tabel IV.3 Distribusi Frekuensi Komite Audit yang memiliki kompetensi di bidang finansial menunjukkan nilai 0 yang terdapat pada rentang 36-46, 69-79, 80-90 (dalam persen). Hal ini disebabkan karena perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2014 tidak memiliki jumlah proporsi komite audit yang memiliki kompetensi di bidang finansial pada kisaran tersebut. Komite Audit dengan proporsi komite audit yang memiliki kompetensi di bidang finansial yang paling kecil yaitu dikisaran 25-35 sebanyak 12 perusahaan sedangkan yang paling besar yaitu dikisaran 91-101 sebanyak 37 perusahaan. Salah satu syarat suatu komite audit adalah salah seorang dari anggotanya memiliki latar belakang pendidikan keuangan atau memiliki kompetensi di bidang finansial. Perusahaan-perusahaan Manufaktur telah memenuhi syarat tersebut dan yang memiliki Komite Audit yang memiliki kompetensi dibidang finansial hampir seluruhnya sebanyak 37 perusahaan.

## **B. Analisis Data**

### **1 Uji Multikolinearitas**

Bertujuan untuk mengetahui Bertujuan untuk mengetahui hubungan yang bermakna antara masing-masing variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Menurut Imam Ghozali (2003) pedoman suatu model regresi bebas dari multikolinearitas adalah:

- Mempunyai nilai VIF disekitar angka 1 samai 10
- Mempunyai angka *tolerance* mendekati 1.

- Koefisien korelasi antar variabel independen harus lemah (dibawah 0,5).

Jika korelasi kuat maka terjadi masalah multikolinearitas.

Berdasarkan pengujian Multikolinearitas didapatkan hasil pada tabel IV.4 berikut.

**TABEL IV.4**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Komin	.985	1.016
	Kompt	.985	1.016

Sumber : Data Sekunder diolah

**TABEL IV.5**  
**Correlation Matrix**

		Constant	Komin	Kompt
Step 1	Constant	1.000	-.809	-.654
	Komin	-.809	1.000	.132
	Kompt	-.654	.132	1.000

Sumber : Data Sekunder diolah

Dari tabel terlihat bahwa semua nilai *tolerance* = 0,985 mendekati 1 dan semua nilai VIF = 1,016 berada disekitar angka 1. Sedangkan koefisien korelasi antar variabel Independen = 0,132 dibawah 0,5, berarti persamaan regresi tersebut bebas dari multikolinearitas.

## 2. Uji Kesesuaian Model (*Hosmer and Lemeshow Test*)

Sebelum melakukan pengujian regresi logistik, langkah yang ditempuh adalah menilai kelayakan model regresi. Hipotesis untuk menilai model fit adalah:  
 Ho: Tidak ada perbedaan yang nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati.

Hi : Ada perbedaan yang nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan Klasifikasi yang diamati.

Hasil pengolahan data didapat nilai Hosmer and Lemeshow Test sebagai berikut:

**TABEL IV.6**  
**Hosmer and Lemeshow Test**

Step	Chi-square	df	Sig.
1	11.171	7	.131

Sumber: Data sekunder diolah

Dari output dapat diketahui nilai *Hosmer and Lemeshow* dengan nilai sebesar 0,131. Hal ini berarti model cukup baik karena memiliki nilai signifikansi lebih besar dari  $\alpha = 5\%$  sehingga Ho diterima.

## 3. Menilai keseluruhan model (*overall model fit*)

Setelah menilai kelayakan model regresi yang digunakan, maka langkah selanjutnya adalah menilai keseluruhan model (*overall model fit*) dengan melihat angka -2 Log Likelihood (LL) pada awal (Blok Number = 0) dan angka -2 Log Likelihood pada akhir Blok Number = 1. Dari pengolahan data dihasilkan nilai -2 Log Likelihood (LL) pada awal (Blok Number = 0) sebesar 82,931 dan pada akhir

Blok Number = 1 sebesar 74,228, dengan demikian terjadi penurunan angka -2 Log Likelihood sebesar 7,594 yang menunjukkan model regresi baik/fit.

**Tabel IV.7**  
**Iteration History<sup>a,b,c</sup>**

Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients
			Constant
Step 0	1	82.931	1.348
	2	81.829	1.612
	3	81.822	1.636
	4	81.822	1.636

Sumber : Data sekunder diolah

**Iteration History<sup>a,b,c,d</sup>**

Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients		
			Constant	Komin	Kompt
Step 1	1	77.386	.329	-.007	.017
	2	74.378	-.022	-.010	.029
	3	74.229	-.171	-.010	.032
	4	74.228	-.183	-.010	.033
	5	74.228	-.183	-.010	.033

Sumber: Data sekunder diolah

**TABEL IV.8**

**Omnibus Tests of Model Coefficients**

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	7.594	2	.022
	Block	7.594	2	.022
	Model	7.594	2	.022

Sumber : Data sekunder diolah

Dari tabel 4.5 terlihat bahwa berdasarkan nilai *omnibus test of model coefficients* sebesar  $0,022 < 0,050$ ,  $\alpha = 5\%$  sehingga bisa disimpulkan bahwa Komisaris Independen dan Komite Audit berpengaruh secara simultan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

#### 4. Hasil Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis yang diajukan, digunakan model regresi logistik yang menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam penelitian ini yaitu komisaris independen dan komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

**TABEL IV.9**  
**Model Summary**

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	74.228 <sup>a</sup>	.079	.134

Sumber: Data Sekunder diolah

Nilai Nagelkerke R Square ( $R^2$ ) = 13%, ini menunjukkan bahwa ketepatan waktu pelaporan keuangan sebagai variabel dependen dapat dijelaskan sebesar 13% oleh variabel independen yang digunakan sedangkan sisanya bisa dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang ada diluar penelitian ini.

TABEL IV.10

## Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 <sup>a</sup>	Komin	-.010	.026	.149	1	.699	.990
	Kompt	.033	.013	6.316	1	.012	1.033
	Constant	-.183	1.460	.016	1	.900	.833

Sumber : Data sekunder diolah

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dibuat persamaan sebagai berikut :

$$\ln \frac{TL}{1-TL} = -183 - 0,010 \text{ KOMIN} + 0,033 \text{ KOMPT} + e$$

Dari persamaan tersebut konstanta menunjukkan nilai -183 mempunyai arti bahwa jika komisaris independen dan komite audit memiliki nilai konstan maka ketepatan waktu pelaporan keuangan tahunan akan cenderung mengalami penurunan dengan asumsi faktor lainnya konstan.

Persamaan tersebut menunjukkan koefisien regresi logistik dari komisaris independen sebesar -0,010 mempunyai arti bahwa apabila komisaris independen naik, maka ketepatan waktu pelaporan keuangan cenderung mengalami penurunan dengan asumsi faktor lainnya konstan.

Persamaan tersebut juga menunjukkan koefisien regresi logistik dari kompetensi komite audit sebesar 0,033 mempunyai arti bahwa apabila kompetensi komite audit naik, maka ketepatan waktu pelaporan keuangan akan mengalami peningkatan dengan asumsi faktor lainnya konstan.



Dari tabel 4.5 terlihat nilai signifikan variabel Komisaris Independen sebesar 0,699 lebih besar dari  $\alpha = 5\%$  dan mempunyai nilai koefisien bertanda negatif. Hal ini berarti variabel Komisaris Independen yang diproksi dengan proporsi Komisaris Independen dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2014.

Dari tabel 4.5 terlihat nilai signifikan variabel Komite Audit yang diproksi dengan proporsi anggota komite audit yang memiliki keahlian (kompetensi) di bidang keuangan dari jumlah seluruh anggota Komite audit sebesar 0.012 lebih kecil dari  $\alpha = 5\%$  sehingga hipotesis diterima secara statistik dengan arah yang positif. Hal ini berarti keahlian keuangan dalam struktur keanggotaan Komite Audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

### C. Interpretasi Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari BEI ([www.icamel.co.id](http://www.icamel.co.id) dan [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) data tersebut merupakan dokumentasi tentang tanggal penyerahan laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan perusahaan yang menampilkan data yang lengkap mengenai komisaris independen dan komite audit.

Berdasarkan hasil penelitian, model persamaan regresi berganda adalah

$$\frac{TL}{1-TL} = -183 - 0,010 \text{ KOMIN} + 0,033 \text{ KOMPT} + e$$

Persamaan ini berarti nilai konstanta bernilai -183 menyatakan jika tidak ada peningkatan komisaris independen dan komite audit maka ketepatan waktu pelaporan keuangan hanya sebesar -183. Nilai koefisien komisaris independen sebesar -0.010 menyatakan jika terjadi peningkatan sebesar 1% maka ketepatan waktu pelaporan keuangan akan menurun sebesar -0.010 dengan asumsi variabel bebas lainnya bernilai tetap. Nilai koefisien kompetensi komite audit sebesar 0,033 menyatakan bahwa apabila kompetensi komite audit naik sebesar 1 persen maka ketepatan waktu akan naik sebesar 0,033.

Dari hasil pengujian hipotesis, proporsi Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, komisaris independen yang diproksi dengan proporsi Komisaris Independen dari jumlah seluruh anggota komisaris terhadap ketepatan waktu pelaporan Keuangan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,699 lebih besar daripada taraf signifikansi 5%, atau 0,050. Dengan demikian hasil ini menunjukkan bahwa Komisaris Independen belum efektif dalam melakukan pengawasan terkait dengan keterbukaan informasi laporan keuangan kepada publik. Hasil penelitian Savitri (2010) yang berjudul “Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan: Studi pada perusahaan di BEI” terdapat perbedaan yaitu bahwa dalam penelitiannya komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan dan Yogi Mahendra dan Wijana Asmara Putra (2014) penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Komisaris Independen, Kepemilikan, Institusional, Profitabilitas, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Ketepatan Waktuan” dimana komisaris independen berpengaruh signifikan

terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hasil penelitian Purwati (2006) yang berjudul “Pengaruh Karakteristik Komite Audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan publik yang tercatat di BEJ” terdapat kesamaan pada komisaris independen terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan.

Dari hasil pengujian hipotesis mengenai pengaruh Komite Audit yang diproksi dengan proporsi anggota komite audit yang memiliki keahlian di bidang finansial dari seluruh jumlah anggota komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara keahlian keuangan dalam struktur Komite Audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan publik yang terdaftar di BEI tahun 2014. Terlihat pada nilai signifikansi sebesar 0,012 dimana lebih kecil dari taraf signifikansi 5% atau 0,050. Hasil penelitian Purwati (2006) yang berjudul “Pengaruh Karakteristik Komite Audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan publik yang tercatat di BEJ” terdapat kesamaan yaitu anggota komite audit yang berkompeten di bidang finansial berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Setelah diketahui pengaruh masing-masing variabel bebas secara parsial, maka secara umum komisaris independen dan komite audit berpengaruh secara serentak terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Pernyataan itu dapat dilihat berdasarkan nilai *omnibus test of model coefficients* sebesar  $0,022 < 0,050$ ,  $\alpha = 5\%$  sehingga bisa disimpulkan bahwa Komisaris Independen dan Komite Audit berpengaruh secara simultan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Nilai Nagelkerke R Square sebesar 13%, ini menunjukkan bahwa ketepatan waktu pelaporan keuangan sebagai variabel dependen dapat dijelaskan sebesar 13% oleh variabel independen yang digunakan sedangkan sisanya bisa dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang ada diluar penelitian ini.

Dalam penelitian ini, peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak sepenuhnya sampai pada tingkat kebenaran mutlak. Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan yang dilakukan selama melakukan penelitian ini. Adapun keterbatasan-keterbatasan penelitian dalam meneliti pengaruh komisaris independen dan komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya melibatkan dua variabel yaitu komisaris independen dan komite audit sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Karena penelitian ini hanya ingin melihat pengaruh dari komisaris independen dan komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Komisaris independen merupakan dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan (tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan) memiliki integritas bebas dari pengaruh yang berhubungan dengan kepentingan pribadi atau pihak lain, serta dapat bertindak secara objektif dan independen dengan berpedoman pada prinsip-prinsip *good corporate governance*, sementara komite audit dibentuk untuk memberdayakan fungsi dewan komisaris dalam melakukan pengawasan. Komite audit diketuai oleh komisaris independen. Masih banyak faktor-faktor lain yang dapat dijadikan sebagai variabel yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan.

2. Dalam mengukur variabel independen, komisaris independen hanya diukur dengan proksi proporsi komisaris independen. Komisaris independen yang diukur dengan proporsi dewan komisaris masih hanya sekedar untuk memenuhi regulasi sehingga belum terlihat efektivitasnya dalam melakukan fungsi pengawasan dalam perusahaan. Komite audit hanya diukur dengan proporsi komite audit yang memiliki kompetensi dibidang finansial. Masih banyak proksi-proksi lainnya yang dapat dijadikan alat ukur seperti jumlah pertemuan (rapat) yang dilakukan oleh komisaris independen dan komite audit.
3. Peneliti hanya meneliti pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2014.
4. Banyak terjadi kesenjangan data pada tanggal penyerahan pelaporan keuangan perusahaan-perusahaan manufaktur pada tahun 2014 sehingga penelitian menggunakan variabel *dummy* untuk mengukur ketepatan waktu pelaporan keuangan.
5. Masih banyaknya data yang tidak lengkap, yaitu banyak perusahaan yang tidak memiliki tanggal penyerahan laporan keuangan dan data yang tidak lengkap mengenai komisaris independen dan komite audit sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Sehingga total sampel hanya 92 perusahaan cukup jauh dari total populasi perusahaan manufaktur yaitu 142 perusahaan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini menguji pengaruh Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2014. Berdasarkan analisis dari penelitian yang telah diuraikan dan dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal, yakni sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian, Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Ini menunjukkan bahwa Komisaris Independen yang diukur dengan proporsi komisaris independen dari seluruh jumlah anggota komisaris belum mampu berfungsi dalam melakukan pengawasan dalam hal transparansi informasi secara maksimal dan masih sebatas untuk memenuhi regulasi yang ditetapkan Regulator (OJK).
2. Komite Audit yang memiliki kompetensi di bidang keuangan berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Dengan demikian keberadaan anggota komite audit yang kompeten di bidang keuangan telah mampu melaksanakan tugasnya membantu dewan komisaris dalam mengawasi pelaporan keuangan.
3. Secara simultan komisaris independen dan komite audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan

4. Komisaris independen dan komite audit merupakan suatu mekanisme dalam tata kelola perusahaan yang memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur tang terdaftar di BEI tahun 2014.
5. Berdasarkan nilai Nagelkerke R Square ( $R^2$ ), menunjukkan nilai sebesar 13%, menunjukkan bahwa Komisaris Independen dan Komite Audit hanya memiliki pengaruh sebesar 13%. Hal ini berarti masih banyak faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan.

## **B. Implikasi**

1. Implikasi yang didapatkan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Komisaris independen yang diukur dengan proporsi komisaris independen dari seluruh jumlah anggota komisaris dengan jumlah rata-rata hanya 40,40% masih hanya sebatas untuk mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh ojk yaitu telah memenuhi regulasi yang ditetapkan yaitu minimal memiliki 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris, sehingga masih belum efektif dalam melakukan pengawasan.
2. Komisaris Independen yang efektif dalam melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap keterbukaan informasi akan meningkatkan kualitas pengungkapan (*disclosure*) dalam laporan keuangan salah satunya adalah menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. Laporan keuangan merupakan sumber informasi yang didalamnya memuat

informasi material. Investor memiliki hak untuk memperoleh informasi material secara tepat waktu dan teratur. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip good corporate governance yaitu, *transparency* dan *Fairness*

3. Perusahaan-perusahaan manufaktur telah memiliki anggota komite audit yang sesuai dengan syarat yaitu salah seorang dari anggotanya memiliki latar belakang pendidikan keuangan atau memiliki kompetensi di bidang finansial. Banyak perusahaan manufaktur yang telah memiliki anggota komite audit yang berkompeten dibidang finansial lebih dari satu. Komite audit merupakan komite yang bertugas untuk membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap laporan keuangan. Komite audit yang memiliki kompetensi di bidang finansial dengan kemampuannya tersebut diharapkan memimpin komite audit dalam mengidentifikasi, mengajukan pertanyaan, baik kepada manajemen maupun auditor eksternal sehingga dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan yang salah satunya adalah penyampaian laporan keuangan yang tepat waktu kepada publik.
4. Dengan adanya komisaris independen dan komite audit di dalam perusahaan yang mengawasi kinerja manajemen akan mendorong manajemen dalam perusahaan untuk lebih meningkatkan kinerja terkait dengan prinsip-prinsip *good corporate governance* yaitu *transparency*, *fairness*, *accountability*, dan *responsibility* dalam hal ini berkaitan dengan penyampaian laporan keuangan yang tepat pada waktunya kepada publik.



5. Komisaris Independen dan Komite audit sebagai mekanisme dari GCG memiliki peran yang penting untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik yang dapat merangkul seluruh kepentingan pada setiap elemen yang ada pada pasar modal. Laporan keuangan sebagai sumber informasi material yang sangat dibutuhkan oleh para penggunanya harus disampaikan tepat pada waktunya sehingga manfaat dari laporan keuangan perusahaan tersebut tidak berkurang. Ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan salah satu indikator terwujudnya tata kelola perusahaan yang baik.
6. Peran Komisaris Independen dan Komite audit yang bekerja secara efektif dalam mengawasi kinerja manajemen dalam perusahaan akan menjadi nilai tambah bagi perusahaan, sesuai dengan pengertian dari *good corporate governance* itu sendiri. Perusahaan yang memiliki komisaris independen dan komite audit serta menyampaikan laporan keuangan tepat pada waktunya akan memberikan nilai tersendiri pada perusahaan dari investor yang sedang atau akan menanamkan modalnya.

### **C. Saran**

Berdasarkan hasil analisis dan simpulan, saran yang dapat diajukan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Untuk lebih meningkatkan ketepatan waktu pelaporan keuangan, perusahaan diharapkan komisaris independen dan komite audit agar lebih efektif atau meningkatkan efektivitasnya dalam melaksanakan tugasnya

mengawasi kinerja manajemen, tidak hanya sekedar untuk memenuhi regulasi yang ada.

2. Bagi pihak manajemen perusahaan diharapkan lebih memperhatikan ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan agar sesuai dengan yang telah ditetapkan pihak regulator dan juga untuk memenuhi hak investor, sehingga terhindar dari sanksi yang diberikan dan juga mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik yang dapat merangkul seluruh kepentingan elemen-elemen dalam perusahaan dan pasar modal.
3. Bagi peneliti agar dapat menggunakan proxy ataupun variabel independen lain yang dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Karena masih banyak faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Dan juga menentukan sampel dapat digunakan cara lain selain *purposive sampling* dan juga menggunakan data *time series*.
4. Bagi pasar modal untuk lebih meningkatkan atau memperketat regulasi terutama dalam kaitannya dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan emiten kepada publik dengan menerapkan sanksi yang lebih tegas agar mendorong perusahaan atau emiten untuk lebih meningkatkan ketepatan waktu pelaporannya kepada publik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Shamsul-Nahar. “*Board Composition, Audit Committee and Timeliness of Corporate Financial Reports in Malaysia*” , *Corporate Ownership & Control* , Vol.4, issue 2, Winter 2006-2007.pp.33-45
- Alijoyo, Antonius dan Subarto Zaini. *Komisaris Independen: Penggerak Praktik GCG di Perusahaan*. Jakarta: PT. Indeks, 2004
- Ary Suta, I Putu Gede. *Menuju Pasar Modal Modern*. Jakarta: Yayasan SAD Satria Bhakti, 2000
- Baridwan, Zaki. *Intermediate Accounting*, edisi kedelapan. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004
- Belakoui, Ahmed Riahi. *Accounting Theory*: edisi 5. Jakarta: Salemba Empat, 2006
- Chambers, Anne E and Stephen H. Pennman, “*The Timeliness of Reporting and The Stock Price reaction to earnings announcements*”, *Journal of Accounting research* , vol.22,No. 1,*Spring* 1984,pp.21-47.
- Das Prena, Gine.“Pengaruh Keberadaan Komisaris Independen pada Kecepatan Penyerahan Laporan Keuangan Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek di Indonesia”, *Jurnal Riset Akuntansi (JUARA)*, Vol. 2, No.1, Feb 2012, hlm.22-30
- Daniri, Mas Achmad. *LEAD BY GCG* .Jakarta : Gagah Bisnis, 2014
- Dyer, J., C., IV and A., J., McHugh,“*The Timeliness of Australian Annual Report*”, *Journal of Accounting Research*, Autumn 1975, pp.204-219
- Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)*. Peranan Dewan komisaris dan Komite Audit dalam pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan) Edisi ke-2 (Jakarta: FCGI,2002)
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19* (edisi kelima.) Semarang: Universitas Diponegoro, 2011
- Gujarati, Damodar. *Ekonometrika Dasar* : Edisi Keenam. Jakarta: Erlangga,2003
- Hotman et al, “Karakteristik Komite Audit dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”, *Symposium Nasional Akuntansi XVI, Manado*, 25-28 September 2013, hlm, 1843-1926

- Khairandy, Ridwan dan Camelia Malik. *Good Corporate Governance: Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*. Jogjakarta: Total Media, 2007
- Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor: Kep-643/BL/2012 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit (<http://www.ojk.go.id/Files/regulasi/pasar-modal/bapepam-pm/emiten-pp/peraturan-lain/6.IX.I.5.pdf>) diakses pada tanggal 1 Desember 2014
- Lampiran Peraturan BAPEPAM Nomor : KEP-346/BL/2011 No.X.K.2 ([www.bapepam.go.id/pasar\\_modal/publikasi\\_pm/siaran\\_pers\\_pm/2011/pdf/Press\\_release\\_X.K.2.pdf](http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/publikasi_pm/siaran_pers_pm/2011/pdf/Press_release_X.K.2.pdf)) diakses pada tanggal 11 November 2014
- Lampiran Rancangan Peraturan OJK tentang Perubahan atas Peraturan Nomor IX.I.6 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. (<http://ojk.go.id/permintaan-tanggapan-masyarakat-terkait-rancangan-peraturan-ijk-tentang-perubahan-atas-peraturan-nomor-ix-i-6-tentang-direksi-dan-dewan-komisaris-emiten-atau-perusahaan-publik>) di akses pada 1 Desember 2014
- Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ([www.esdm.go.id/6-undang-undang-nomor-40-tahun-2007.html](http://www.esdm.go.id/6-undang-undang-nomor-40-tahun-2007.html)) diakses pada tanggal 1 Desember 2014
- Naimi, Mohammad et al, “*Corporate Governance and Audit Report Lag in Malaysia*”. *Asian Academy of Management journal of Accounting and Finance*, Vol 6, pp. 57-84
- Maksum, Azhar. “Tinjauan atas Good Corporate Governance di Indonesia”, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Akuntansi Manajemen pada Fakultas Ekonomi, diucapkan dihadapan Rapat Terbuka Universitas Sumatera Utara, Gelanggang Mahasiswa, Kampus USU, 17 Desember 2005
- Nasarudin, M. Irsan dan Indrasurya. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia: Menuju Tata Kelola Emiten dan Perusahaan Publik yang Lebih Baik*. Jakarta: OJK, 2014
- Owusu-Ansah, Stephen. “*Timeliness of Corporate Financial Reporting in Emerging Capital Markets : Empirical Evidence from The Zimbabwe Stock Exchange*”. *Forthcoming in Accounting & Business Research*, vol.30, Summer 2000, pp.241-254

- Purwati, "Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pada Perusahaan Publik Yang Tercatat Di BEJ." Thesis, , laporan penelitian, Universitas Diponegoro.
- Respati, Novita Weningtyas. "Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan: Studi Empiris Di Bursa Efek Jakarta", *Jurnal Maksi vol. 4*, Januari 2004, hlm. 67-81
- Rifai, Badriyah. Peran Komisaris Independen dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di Perusahaan Publik, *Jurnal Hukum No. 3 Vol. 16* Juli 2009: 396 – 412.
- Saleh, Rachmad. "Studi Empiris Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta", *Simposium Nasional Akuntansi VII*, Desember 2004, hlm. 897-910
- Savitri, Roswita .“ Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan: Studi pada Perusahaan Manufaktur di BEI”, Skripsi, laporan penelitian, Universitas Diponegoro
- Sitorus, Irna Juliana.” Analisis Peran Komite Audit yang Efektif dan Independensi Dewan Komisaris (Studi pada Badan Usaha Milik Negara yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia”, *Seminar Nasional Akuntansi dan Bisnis*, Bandung, 27 Maret 2012,hlm.662-668
- Surya, Indra dan ivan Yustiavandana. Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha. Jakarta: Kencana, 2008
- Surya, Indra. Transaksi Benturan Kepentingan di Pasar Modal Indonesia. Jakarta: Lembaga Studi Hukum Dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
- Suwardjono. Akuntansi Pengantar: Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta
- Swami, Ni Putu Dewiyani dan Made Yeni Latrini. 2013.”Pengaruh Karakteristik Corporate Governance Terhadap Audit Report Lag”. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 4.3,2013,ISSN:2032-8556,hlm.530-549
- Tim Studi Pengkajian Penerapan Prinsip-Prinsip OECD 2004 dalam Peraturan Bapepam mengenai Corporate Governance, *Studi Penerapan Prinsip-Prinsip OECD 2004 dalam Peraturan Bapepam mengenai Corporate Governance*. Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, 2006
- Tugiman, Hiro. Komite Audit. Bandung: PT. Eresko, 1995

W., Komang Ratna dan Ketut Ali S., "Pengaruh Karakteristik Komite audit Terhadap *Timeliness* Pelaporan Keuangan: Perusahaan *Go Public* Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia", E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 6.1, 2014, ISSN;2302-8566,hlm.154-166

## SUMBER INTERNET

(<http://koranjakarta.com/?10031bei%20beri%20peringatan%20kepada%2049%20emiten>)  
 (<http://pasardana.com/tag/laporan-keuangan/>)  
 (<http://investasi.kontan.co.id/news/manajemen-hotl-janji-tak-mengulangi-kesalahan>)  
 (<http://investasi.kontan.co.id/news/bei-batasi-jabatan-direksi-dan-komisaris>)  
 (<http://www.crmsindonesia.org/node/660>)  
 (<http://investasi.kontan.co.id/news/marak-kasus-komite-audit-akan-diperkuat-1>)  
 (<http://akuntanonline.com/showdetail.php?mod=art&id=454&t=Ada%20Andil%20OAP,%20Emiten%20Telat%20Sampaikan%20LK&kat=Auditing>)  
 (<http://www.ift.co.id/posts/bei-suspend-emiten-yang-tak-jelaskan-keterlambatan-laporan-keuangan>)  
 (<http://www.pans.co.id/?page=berita&id=SU5GLTIwMTMwMTA4MTIwMDIxLnhtbA==>)  
 (<http://investasi.kontan.co.id/news/ini-alasan-born-telat-rilis-laporan-keuangan-2013>)  
[www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)  
[www.icamel.co.id](http://www.icamel.co.id)

# LAMPIRAN



## Lampiran I

## Data Ketepatan waktu pelaporan keuangan

1	INTP	78	1	30	IGAR	63	1
2	SMBR	58	1	31	IPOL	90	1
3	SMCB	68	1	32	TRST	90	1
4	SMGR	63	1	33	YPAS	89	1
5	AMFG	89	1	34	CPIN	90	1
6	IKAI	89	1	35	JPFA	58	1
7	KIAS	90	1	36	SULI	83	1
8	MLIA	85	1	37	TIRT	90	1
9	ALMI	90	1	38	ALDO	86	1
10	BAJA	90	1	39	INKP	86	1
11	BTON	90	1	40	INRU	89	1
12	CTBN	86	1	41	KBRI	89	1
13	GDST	85	1	42	SPMA	89	1
14	JKSW	90	1	43	TKIM	86	1
15	JPRS	89	1	44	KRAH	91	0
16	KRAS	71	1	45	ASII	85	1
17	LION	85	1	46	AUTO	84	1
18	LMSH	86	1	47	BRAM	90	1
19	NIKL	63	1	48	GDYR	91	0
20	BRPT	90	1	49	IMAS	90	1
21	BUDI	90	1	50	LPIN	91	0
22	DPNS	91	0	51	MASA	89	1
23	EKAD	89	1	52	NIPS	90	1
24	TPIA	83	1	53	PRAS	90	1
25	UNIC	89	1	54	ADMG	85	1
26	AKKU	91	0	55	ARGO	91	0
27	AKPI	79	1	56	CNTX	91	0
28	BRNA	92	0	57	ERTX	86	1
29	FPNI	85	1	58	ESTI	90	1

59	INDR	89	1
60	PBRX	89	1
61	TFCO	89	1
62	TRIS	83	1
63	UNTX	86	1
64	BATA	90	1
65	BIMA	91	0
66	JECC	91	0
67	KBLI	89	1
68	KBLM	91	0
69	VOKS	110	0
70	PTSN	90	1
71	CEKA	90	1
72	DLTA	90	1
73	ICBP	79	1
74	INDF	82	1
75	MLBI	86	1
76	MYOR	91	0
77	ROTI	86	1
78	SKBM	91	0
79	SKLT	89	1
80	STTP	91	0
81	ULTJ	90	1
82	RMBA	90	1
83	DVLA	89	1
84	INAF	69	1
85	KAEF	64	1
86	KLBF	89	1
87	MERK	71	1
88	SCPI	92	0
89	SIDO	86	1
90	ADES	92	0
91	MBTO	89	1
92	TCID	77	1
93	KICI	85	1
94	LMPI	75	1

## Lampiran 2

## Data Komisaris Independen

1	INTP	43
2	SMBR	60
3	SMCB	50
4	SMGR	43
5	AMFG	33
6	IKAI	50
7	KIAS	30
8	MLIA	40
9	ALMI	50
10	BAJA	33
11	BTON	50
12	CTBN	33
13	GDST	33
14	JKSW	50
15	JPRS	50
16	KRAS	33
17	LION	33
18	LMSH	33
19	NIKL	33
20	BRPT	33
21	BUDI	33
22	DPNS	33
23	EKAD	50
24	TPIA	29
25	UNIC	50
26	AKKU	50
27	AKPI	40
28	BRNA	43
29	FPNI	50
30	IGAR	33
31	IPOL	33
32	TRST	50
33	YPAS	33
34	CPIN	33
35	JPFA	33
36	SULI	33
37	TIRT	33
38	ALDO	33
39	INKP	44
40	INRU	50
41	KBRI	33
42	SPMA	80
43	TKIM	43
44	KRAH	33
45	ASII	37
46	AUTO	30
47	BRAM	31
48	GDYR	33
49	IMAS	33
50	LPIN	50
51	MASA	40
52	NIPS	33
53	PRAS	33
54	ADMG	40
55	ARGO	40
56	CNTX	33
57	ERTX	50
58	ESTI	67

59	INDR	40
60	PBRX	67
61	TFCO	33
62	TRIS	33
63	UNTX	33
64	BATA	40
65	BIMA	67
66	JECC	67
67	KBLI	40
68	KBLM	33
69	VOKS	40
70	PTSN	33
71	CEKA	33
72	DLTA	40
73	ICBP	43
74	INDF	37
75	MLBI	50
76	MYOR	40
77	ROTI	33
78	SKBM	33
79	SKLT	33
80	STTP	50
81	ULTJ	33
82	RMBA	67
83	DVLA	43
84	INAF	33
85	KAEF	40
86	KLBF	33
87	MERK	33

88	SCPI	33
89	SIDO	33
90	ADES	33
91	MBTO	33
92	TCID	40
93	KICI	33
94	LMPI	50

## Lampiran 3

## Data Komite Audit

1	INTP	100	30	IGAR	67
2	SMBR	33	31	IPOL	100
3	SMCB	33	32	TRST	67
4	SMGR	50	33	YPAS	67
5	AMFG	25	34	CPIN	60
6	IKAI	33	35	JPFA	67
7	KIAS	67	36	SULI	100
8	MLIA	100	37	TIRT	67
9	ALMI	100	38	ALDO	100
10	BAJA	67	39	INKP	67
11	BTON	100	40	INRU	67
12	CTBN	67	41	KBRI	100
13	GDST	100	42	SPMA	33
14	JKSW	33	43	TKIM	67
15	JPRS	100	44	KRAH	67
16	KRAS	100	45	ASII	50
17	LION	100	46	AUTO	67
18	LMSH	100	47	BRAM	33
19	NIKL	50	48	GDYR	33
20	BRPT	100	49	IMAS	100
21	BUDI	100	50	LPIN	67
22	DPNS	100	51	MASA	100
23	EKAD	100	52	NIPS	100
24	TPIA	100	53	PRAS	67
25	UNIC	100	54	ADMG	100
26	AKKU	50	55	ARGO	67
27	AKPI	100	56	CNTX	67
28	BRNA	100	57	ERTX	100
29	FPNI	100	58	ESTI	67

59	INDR	67
60	PBRX	100
61	TFCO	67
62	TRIS	100
63	UNTX	100
64	BATA	67
65	BIMA	67
66	JECC	67
67	KBLI	100
68	KBLM	33
69	VOKS	67
70	PTSN	67
71	CEKA	67
72	DLTA	33
73	ICBP	100
74	INDF	67
75	MLBI	67
76	MYOR	67
77	ROTI	100
78	SKBM	67
79	SKLT	67
80	STTP	33
81	ULTJ	50
82	RMBA	67
83	DVLA	100
84	INAF	33
85	KAEF	100
86	KLBF	67
87	MERK	100

88	SCPI	67
89	SIDO	100
90	ADES	67
91	MBTO	50
92	TCID	50
93	KICI	100
94	LMPI	100

## Lampiran 4

*Data Outlier*Casewise List<sup>b</sup>

Case	Selected Status <sup>a</sup>	Observed	Predicted	Predicted Group	Temporary Variable	
		VAR00002			Resid	ZResid
22	S	0**	.905	1	-.905	-3.088
28	S	0**	.898	1	-.898	-2.959

Sumber : Data diolah

Data Emiten yang *Outlier* : DPNS, BRNA

## Lampiran 5

## 1. Menentukan Interval Komisararis Independen

Menentukan rentang

$$\begin{aligned}\text{Rentang} &= \text{Data terbesar} - \text{data terkecil} \\ &= 80 - 29 \\ &= 51\end{aligned}$$

Banyak interval kelas (aturan Sturges)

$$K = 1 + (3.3) \text{ Log } n$$

$$K = 1 + (3.3) \text{ Log } 92$$

$$K = 1 + (3.3) 1.96$$

$$K = 1 + 6.48$$

$$K = 7.48 \text{ dibulatkan menjadi } 7,5 \text{ kelas}$$

Panjang kelas interval

$$\begin{aligned}P &= \frac{\text{Rentang}}{\text{Kelas}} \\ &= \frac{51}{7,5} = 6,8 \text{ dibulatkan menjadi } 7\end{aligned}$$

## 2. Menentukan Interval Komite Audit

Menentukan rentang

$$\begin{aligned}\text{Rentang} &= \text{Data terbesar} - \text{data terkecil} \\ &= 100 - 25 \\ &= 75\end{aligned}$$

Banyak interval kelas (aturan Sturges)

$$K = 1 + (3.3) \text{ Log } n$$

$$K = 1 + (3.3) \text{ Log } 92$$

$$K = 1 + (3.3) 1.96$$

$$K = 1 + 6.48$$

$$K = 7.48$$

Panjang kelas interval

$$\begin{aligned}P &= \frac{\text{Rentang}}{\text{Kelas}} \\ &= \frac{75}{7.5} = 10\end{aligned}$$



## Lampiran 6

## Hasil Perhitungan Menggunakan SPSS 16

DESCRIPTIVES VARIABLES=Timeliness Komin Kompt

/STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.

**Descriptives****Notes**

Output Created		26-Jan-2016 04:22:30
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	92
Missing Value Handling	Definition of Missing	User defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	All non-missing data are used.
Syntax		DESCRIPTIVES VARIABLES=Timeliness Komin Kompt /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.
Resources	Processor Time	00:00:00.062
	Elapsed Time	00:00:00.255

[DataSet1]

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Timeliness	92	.00	1.00	.8370	.37143
Komin	92	29.00	80.00	40.4022	10.43984
Kompt	92	25.00	100.00	74.3804	23.86631
Valid N (listwise)	92				

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES Timeliness

/METHOD=ENTER Komin Kompt

/CLASSPLOT

/CASEWISE OUTLIER(2)

/PRINT=GOODFIT CORR ITER(1)

/CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5).

## Logistic Regression

### Notes

Output Created		26-Jan-2016 04:22:50
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	92
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing
Syntax		LOGISTIC REGRESSION VARIABLES Timeliness /METHOD=ENTER Komin Kompt /CLASSPLOT /CASEWISE OUTLIER(2) /PRINT=GOODFIT CORR ITER(1) /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5).
Resources	Processor Time	00:00:00.156
	Elapsed Time	00:00:00.262

[DataSet1]

**Case Processing Summary**

Unweighted Cases <sup>a</sup>		N	Percent
Selected Cases	Included in Analysis	92	100.0
	Missing Cases	0	.0
	Total	92	100.0
Unselected Cases		0	.0
Total		92	100.0

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases.

**Dependent Variable Encoding**

Original Value	Internal Value
tidak tepat	0
tepat	1

## Block 0: Beginning Block

Iteration History<sup>a,b,c</sup>

Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients
			Constant
Step 0	1	82.931	1.348
	2	81.829	1.612
	3	81.822	1.636
	4	81.822	1.636

a. Constant is included in the model.

b. Initial -2 Log Likelihood: 81.822

c. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by less than .001.

Classification Table<sup>a,b</sup>

Observed			Predicted		Percentage Correct
			Timeliness		
			tidak tepat	tepat	
Step 0	Timeliness	tidak tepat	0	15	.0
		tepat	0	77	100.0
Overall Percentage					83.7

a. Constant is included in the model.

b. The cut value is .500

## Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 0 Constant	1.636	.282	33.592	1	.000	5.133

## Variables not in the Equation

	Score	df	Sig.
Step 0 Variables Komin	.620	1	.431
Kompt	7.460	1	.006
Overall Statistics	7.664	2	.022

## Block 1: Method = Enter

Iteration History<sup>a,b,c,d</sup>

Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients		
			Constant	Komin	Kompt
Step 1	1	77.386	.329	-.007	.017
	2	74.378	-.022	-.010	.029
	3	74.229	-.171	-.010	.032
	4	74.228	-.183	-.010	.033
	5	74.228	-.183	-.010	.033

a. Method: Enter

b. Constant is included in the model.

c. Initial -2 Log Likelihood: 81.822

d. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than .001.

**Omnibus Tests of Model Coefficients**

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	7.594	2	.022
	Block	7.594	2	.022
	Model	7.594	2	.022

**Model Summary**

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	74.228 <sup>a</sup>	.079	.134

a. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than .001.

**Hosmer and Lemeshow Test**

Step	Chi-square	df	Sig.
1	11.171	7	.131

**Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test**

		Timeliness = tidak tepat		Timeliness = tepat		Total
		Observed	Expected	Observed	Expected	
Step 1	1	1	3.314	7	4.686	8
	2	3	2.501	5	5.499	8
	3	2	1.761	6	6.239	8
	4	4	1.907	7	9.093	11
	5	0	.163	1	.837	1
	6	5	2.682	12	14.318	17
	7	0	.952	11	10.048	11
	8	0	.582	9	8.418	9

Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test

	Timeliness = tidak tepat		Timeliness = tepat		Total
	Observed	Expected	Observed	Expected	
Step 1	1	3.314	7	4.686	8
	2	2.501	5	5.499	8
	3	1.761	6	6.239	8
	4	1.907	7	9.093	11
	5	.163	1	.837	1
	6	2.682	12	14.318	17
	7	.952	11	10.048	11
	8	.582	9	8.418	9
	9	1.138	19	17.862	19

Classification Table<sup>a</sup>

Observed			Predicted		Percentage Correct
			Timeliness		
			tidak tepat	tepat	
Step 1	Timeliness	tidak tepat	0	15	.0
		tepat	0	77	100.0
		Overall Percentage			83.7

a. The cut value is .500



**Variables in the Equation**

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 <sup>a</sup> Komin	-.010	.026	.149	1	.699	.990
Kompt	.033	.013	6.316	1	.012	1.033
Constant	-.183	1.460	.016	1	.900	.833

a. Variable(s) entered on step 1: Komin, Kompt.

**Correlation Matrix**

	Constant	Komin	Kompt
Step 1 Constant	1.000	-.809	-.654
Komin	-.809	1.000	.132
Kompt	-.654	.132	1.000

Tabel.III.1

## HASIL SELEKSI SAMPEL KRITERIA

NO	KRITERIA	Jumlah
1	Jumlah data perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014	142
2	Tidak memiliki tanggal penyerahan laporan keuangan	(15)
3	Tidak memiliki data yang lengkap mengenai komisaris independen dan komite audit	(33)
4	Data outlier	(2)
	Jumlah Sampel	92

TABEL IV.1

## Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Timeliness	92	.00	1.00	.8370	.37143
Komin	92	29.00	80.00	40.4022	10.43984
Kompt	92	25.00	100.00	74.3804	23.86631
Valid N (listwise)	92				

Tabel IV.2  
Distribusi Frekuensi Komisaris Independen

<b>Kelas Interval</b>	<b>Batas Bawah</b>	<b>Batas Atas</b>	<b>Frek. Absolut</b>	<b>Frek. Relatif</b>
29 - 36	28,5	36,5	47	51.1%
37 - 44	36,5	44,5	21	22.8%
45 - 52	44,5	52,5	17	18.5%
53 - 60	52,5	60,5	1	1.1%
61 - 68	60,5	68,5	5	5.4%
69 - 76	68,5	76,5	0	0.0%
77 - 84	76,5	84,5	1	1.1%
Total			92	100%

Tabel IV.3  
Distribusi Frekuensi Komite Audit

<b>Kelas Interval</b>	<b>Batas Bawah</b>	<b>Batas Atas</b>	<b>Frek. Absolut</b>	<b>Frek. Relatif</b>
25 - 35	24,5	35,5	12	13.0%
36 - 46	35,5	46,5	0	0.0%
47 - 57	46,5	57,5	7	7.6%
58 - 68	57,5	68,5	36	39.1%
69 - 79	68,5	79,5	0	0.0%
80 - 90	79,5	90,5	0	0.0%
91 - 101	90,5	101,5	37	40.2%
Total			92	100%

## Hasil Uji Multikolinieritas

**TABEL IV.4**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Komin	.985	1.016
	Kompt	.985	1.016

Sumber : Data Sekunder diolah

**TABEL IV.5**  
**Correlation Matrix**

		Constant	Komin	Kompt
Step 1	Constant	1.000	-.809	-.654
	Komin	-.809	1.000	.132
	Kompt	-.654	.132	1.000

## Uji Kesesuaian Model

**TABEL IV.6**  
**Hosmer and Lemeshow Test**

Step	Chi-square	df	Sig.
1	11.171	7	.131

## Overall Model Fit

**Tabel IV.7**  
Iteration History<sup>a,b,c</sup>

Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients
			Constant
Step 0	1	82.931	1.348
	2	81.829	1.612
	3	81.822	1.636
	4	81.822	1.636

**Iteration History<sup>a,b,c,d</sup>**

Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients		
			Constant	Komin	Kompt
Step 1	1	77.386	.329	-.007	.017
	2	74.378	-.022	-.010	.029
	3	74.229	-.171	-.010	.032
	4	74.228	-.183	-.010	.033
	5	74.228	-.183	-.010	.033

## Hasil Uji Simultan

**TABEL IV.8**  
Omnibus Tests of Model Coefficients

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	7.594	2	.022
	Block	7.594	2	.022
	Model	7.594	2	.022

Uji Cox & Snell R Square dan Nagelkerke R Square

**TABEL IV.9**  
**Model Summary**

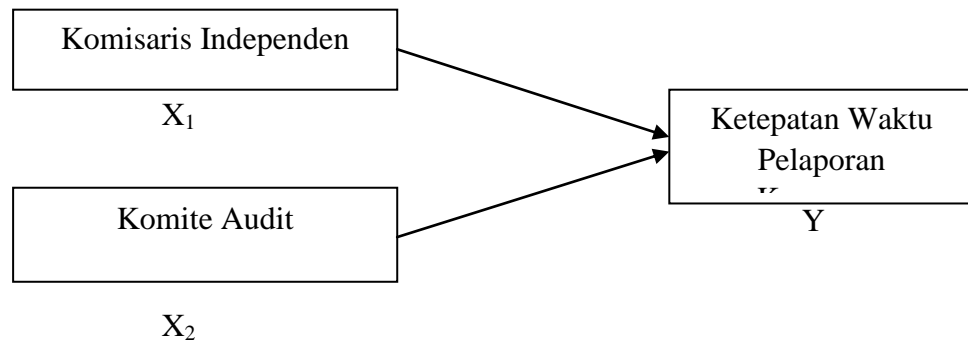
Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	74.228 <sup>a</sup>	.079	.134

Sumber: Data Sekunder diolah

**TABEL IV.10**  
**Variables in the Equation**

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 <sup>a</sup> Komin	-.010	.026	.149	1	.699	.990
Kompt	.033	.013	6.316	1	.012	1.033
Constant	-.183	1.460	.016	1	.900	.833

Sumber : Data diolah

**Gambar III.1****Konstelasi Hubungan Antar Variabel**

Keterangan :

Variabel Bebas ( $X_1$ ) : Komisaris Independen

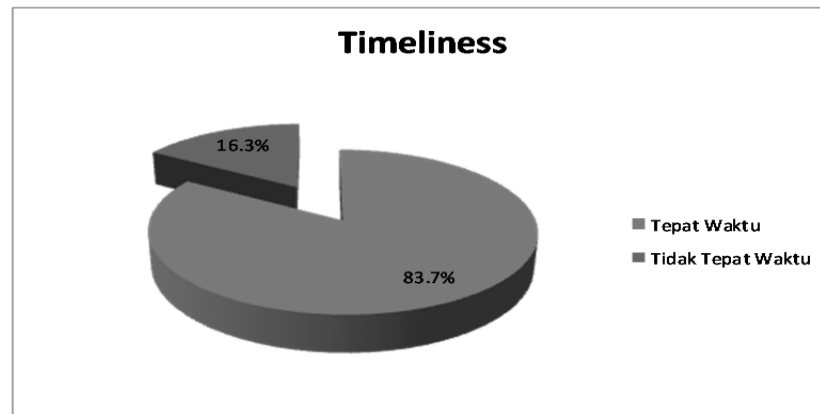
Variabel Bebas ( $X_2$ ) : Komite Audit

Variabel Terikat ( $Y$ ) : Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

—————> : Arah Hubungan

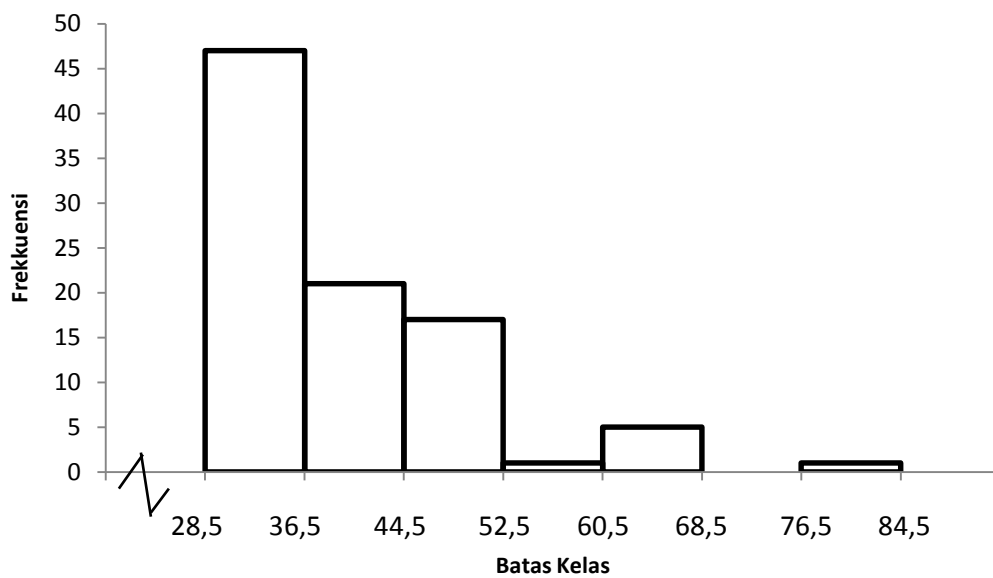


Gambar 4.1

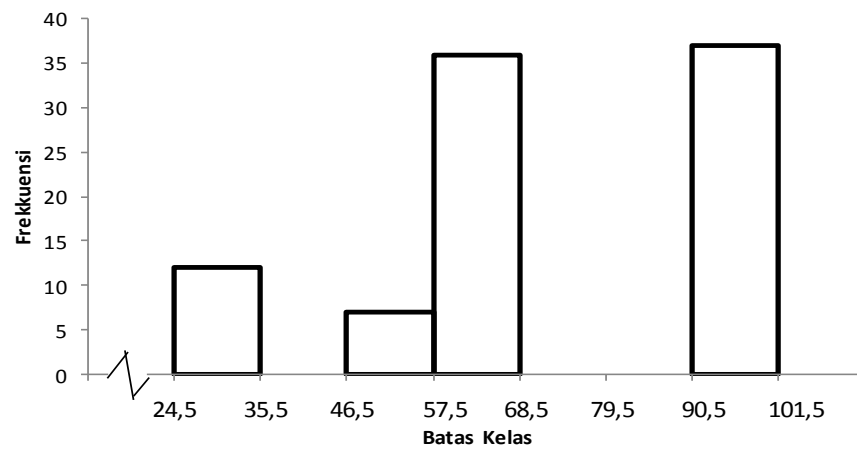
Diagram *Pie* Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Gambar IV.2

## Grafik Histogram Komisaris Independen



**Gambar IV.3**  
**Grafik Histogram Komite Audit**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Zakky Patria Yudha, lahir di Bogor, 20 November 1990, merupakan anak pertama dari dua bersaudara, dengan nama orangtua Bapak Ahmad Taufik dan Ibu Afifah. Memulai pendidikan di TK Islam Fatahillah, Cimanggis, Depok, pada tahun 1995 dan lulus pada tahun 1996.

Kemudian melanjutkan ke SDN Mekarsari IV Cimanggis Depok pada tahun 1996 dan lulus pada tahun 2002. Setelah itu melanjutkan ke SMP Negeri 233 Cibubur Jakarta Timur pada tahun 2002 dan lulus pada tahun 2005. Kemudian melanjutkan ke SMA Negeri 99 Ciracas Jakarta Timur pada tahun 2005 dan lulus pada tahun 2008. Selanjutnya peneliti melanjutkan ke Perguruan Tinggi Universitas Negeri Jakarta Program Studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan Akuntansi pada tahun 2008 melalui jalur Penmaba. Peneliti memiliki pengalaman berorganisasi yaitu menjadi anggota HMJ, BEM, dan BPM FE UNJ. Peneliti juga memiliki beberapa pengalaman kerja di PT. Daeyu Indonesia dan di PT. Surangga Putra Utama.